

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

KOTA PARIAMAN



**LAPORAN
PETA PROSES BISNIS
KOTA PARIAMAN**

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

A. Proses Utama Kota Pariaman (Level 0)

Berdasarkan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025-2029, proses bisnis Pemerintah Daerah dirancang untuk mendukung visi “Terwujudnya Pariaman Kota Wisata yang Maju, Kreatif Berbasis Agama dan Berbudaya”. Struktur Probis ini terdiri atas tiga kelompok utama: inti, manajerial, dan pendukung. Proses bisnis inti mencakup prioritas pembangunan yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan literasi digital, derajat kesehatan, pertumbuhan ekonomi berbasis investasi unggulan, pemberdayaan sosial dan ekonomi, penyediaan infrastruktur ramah lingkungan, peningkatan mitigasi bencana, dan penguatan pariwisata budaya serta ekonomi kreatif.

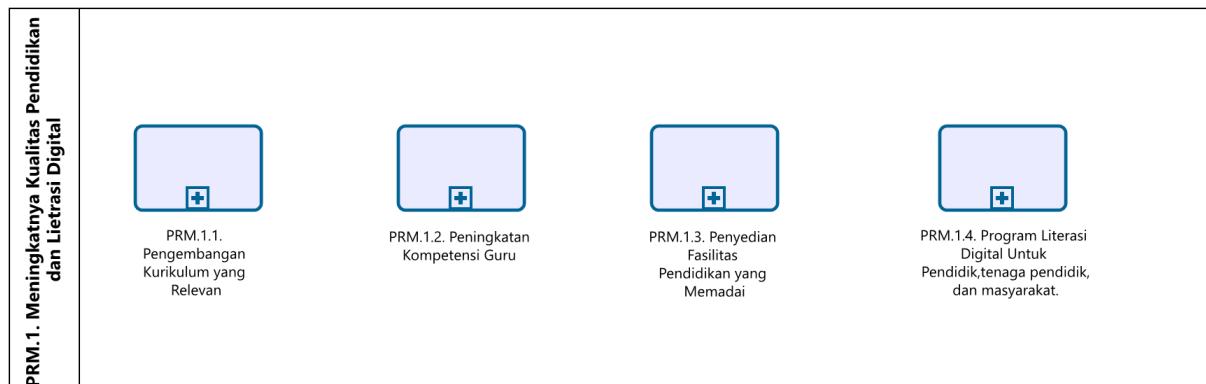
Pada lapisan manajerial, fokus diarahkan pada profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, serta inovasi pelayanan publik berbasis kinerja untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif. Sementara itu, lapisan pendukung berfungsi menjamin keberlangsungan organisasi melalui pengelolaan keuangan dan aset daerah, sumber daya aparatur, reformasi birokrasi, serta penguatan sistem informasi dan digitalisasi layanan. Keseluruhan peta ini menunjukkan sinergi lintas sektor dalam RPJMD untuk menciptakan pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima sesuai arah pembangunan Kota Pariaman 2025–2029.

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN	INTI	PRM.1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Literasi Digital	PRM.3. Meningkatnya Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi	PRM.5. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk	PRM.7. Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	PRM.9. Meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana	PRM.11. Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya, Religi, dan Ekonomi Kreatif
		PRM.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk	PRM.4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sektor unggulan dan investasi	PRM.6. Meningkatnya kesempatan kerja dan kualitas tenaga kerja	PRM.8. Tersedianya infrastruktur ramah lingkungan dan berkelanjutan	PRM.10. Pelestarian dan Penguatan Budaya Lokal berbasis ABS-SBK	
		PRM.12. Meningkatnya Profesionalisme, Transparansi, dan Akuntabilitas Pemerintahan		PRM.13. Terwujudnya Inovasi dan Pelayanan Publik yang Prima			
		PRM.14 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		PRM.15 Pengelolaan Sumber Daya Aparatur dan Reformasi Birokrasi		PRM.16 Penguatan Sistem Informasi dan Digitalisasi Layanan	

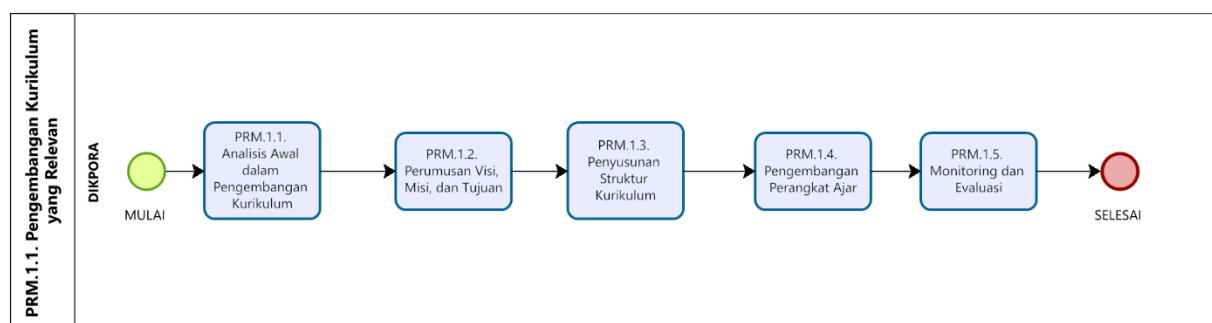
1. Subproses dan Lintas Fungsi, PRM.1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Literasi Digital. (Level 1)

Proses ini merupakan tujuan program utama di bidang pendidikan dan transformasi digital masyarakat. Tujuannya untuk memastikan mutu pendidikan meningkat dan masyarakat memiliki kemampuan literasi digital yang baik. Proses ini selaras dengan dengan visi kota wisata berbasis budaya dan misi pengembangan SDM unggul dan adaptif terhadap kemajuan teknologi.

Proses ini mencakup pengembangan kurikulum yang relevan, peningkatan kompetensi guru, penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai, serta pelaksanaan program literasi digital bagi masyarakat. Keempat komponen tersebut saling terintegrasi untuk memastikan peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan akses pembelajaran berbasis digital. Dalam pelaksanaannya, proses ini mengandalkan data kinerja pendidikan dari unit pelaksana dan sekolah, berkolaborasi dengan proses pendukung seperti perencanaan, keuangan, dan pengelolaan teknologi informasi, serta menghasilkan strategi kebijakan dan program prioritas yang mendukung pencapaian indikator kinerja daerah seperti peningkatan APK, mutu pendidikan, dan literasi digital masyarakat Kota Pariaman.



a. PRM.1.1 Pengembangan Kurikulum yang Relevan (LEVEL 2)

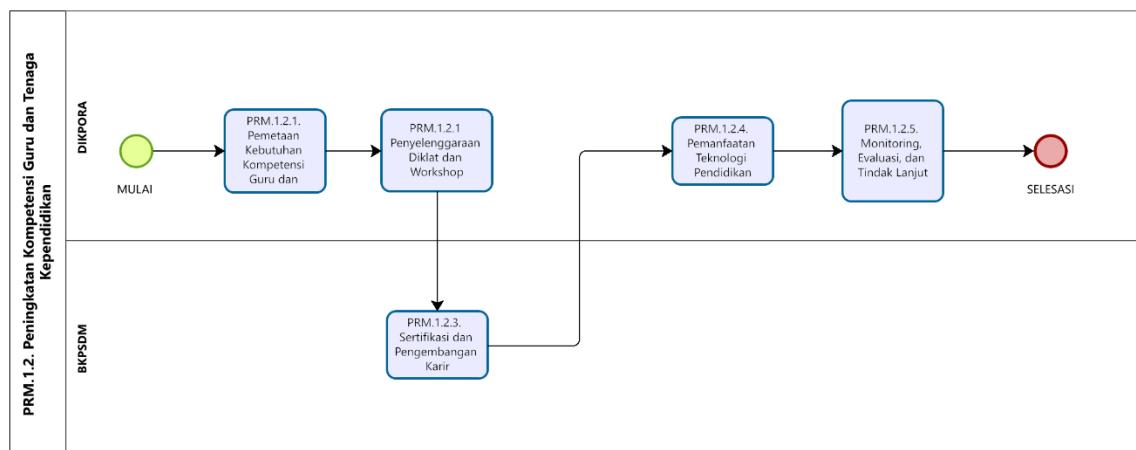


Proses ini merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam upaya mencapai Misi 1 RPJMD Kota Pariaman 2025–2029, yaitu Mewujudkan SDM masyarakat yang Berkualitas, Beriman, dan Berbudaya, sekaligus menjadi sub-proses utama dari PRM.1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Literasi Digital. Proses ini memastikan bahwa kurikulum pendidikan di Kota Pariaman selalu mutakhir, adaptif terhadap kemajuan teknologi (literasi digital), dan

terintegrasi dengan kearifan lokal seperti nilai-nilai agama, budaya, dan sektor pariwisata yang merupakan Visi Kota.

Proses pengembangan kurikulum ini dimulai dari tahapan PRM.1.1.1 Analisis Awal dalam Pengembangan Kurikulum, yang berfungsi untuk memetakan kebutuhan pasar kerja dan tantangan global. Selanjutnya, dilakukan PRM.1.1.2 Perumusan Visi, Misi, dan Tujuan Kurikulum yang selaras dengan RPJMD. Setelah perumusan, dilakukan PRM.1.1.3 Penyusunan Struktur Kurikulum yang mencakup kurikulum muatan lokal Pariaman. Hasil penyusunan kemudian dilanjutkan dengan PRM.1.1.4 Pengembangan Perangkat Ajar, termasuk modul berbasis TIK, yang menjadi *output* yang siap diuji coba. Tahap akhir dari proses ini adalah PRM.1.1.5 Monitoring dan Evaluasi (Kurikulum) yang dilakukan secara berkala untuk menjamin keberlanjutan dan dampak positif dari kurikulum yang telah ditetapkan. Proses ini dilaksanakan oleh DIKPORA dengan melibatkan BKPSDM dan DISKOMINFO dalam aspek kompetensi dan infrastruktur TIK.

b. PRM.1.2 Peningkatan Kompetensi Guru (LEVEL 2)

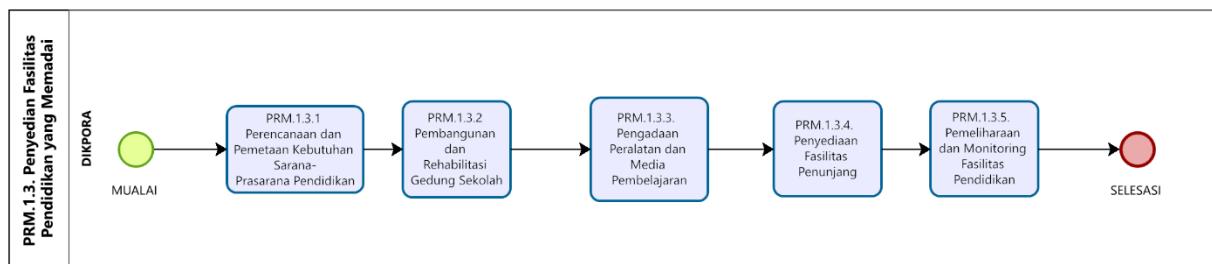


Proses ini merupakan bagian dari Misi 1 RPJMD Kota Pariaman, yaitu “*Mewujudkan SDM masyarakat yang Berkualitas, Beriman, dan Berbudaya*”, sekaligus mendukung sasaran pembangunan bidang pendidikan yang dijabarkan dalam Bab III dan Bab IV RPJMD Kota Pariaman 2025–2029. PRM.1.2 berfokus pada peningkatan profesionalisme dan kemampuan guru agar mampu beradaptasi

dengan perubahan kurikulum, perkembangan teknologi, serta penerapan metode pembelajaran kreatif dan berorientasi pada peserta didik. Proses ini dimulai dengan PRM.1.2.1 Pemetaan Kebutuhan Kompetensi Guru yang dilakukan oleh DIKPORA untuk mengidentifikasi kesenjangan kemampuan tenaga pendidik. Selanjutnya dilanjutkan dengan PRM.1.2.2 Penyelenggaraan Diklat dan Workshop sebagai upaya peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan teknis, pedagogik, dan literasi digital.

Tahap berikutnya, PRM.1.2.3 Sertifikasi dan Pengembangan Karir difasilitasi oleh BKPSDM sebagai bentuk pengakuan dan pembinaan karier guru secara berkelanjutan. Untuk mendorong pembelajaran inovatif, dilakukan PRM.1.2.4 Pemanfaatan Teknologi Pendidikan yang menekankan integrasi sistem digital dalam kegiatan belajar mengajar. Proses diakhiri dengan PRM.1.2.5 Monitoring, Evaluasi, dan Tindak Lanjut guna memastikan efektivitas pelatihan dan peningkatan kualitas pembelajaran. Output dari keseluruhan tahapan ini berupa dokumen pemetaan kompetensi, laporan pelatihan dan sertifikasi guru, serta hasil evaluasi implementasi pembelajaran digital, dengan indikator keberhasilan berupa persentase guru tersertifikasi dan tingkat partisipasi pelatihan berbasis teknologi yang berkontribusi langsung terhadap sasaran

c. PRM.1.3 Penyediaan Fasilitas Pendidikan Yang Memadai (LEVEL 2)

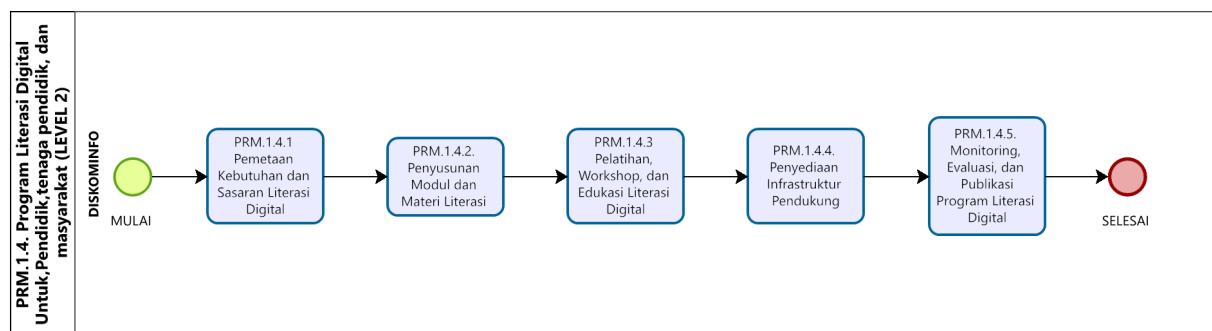


Proses ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan Misi 1 RPJMD Kota Pariaman, yaitu *“Mewujudkan SDM masyarakat yang Berkualitas, Beriman, dan Berbudaya.”* Fokus utamanya adalah memastikan setiap satuan pendidikan memiliki sarana dan prasarana yang layak, aman, serta menunjang proses belajar yang efektif. Tahapan kegiatan dimulai dari PRM.1.3.1 Perencanaan dan Pemetaan Kebutuhan Sarana-Prasarana Pendidikan yang dilaksanakan oleh DIKPORA untuk mengetahui kondisi nyata di lapangan dan menentukan prioritas pembangunan. Hasilnya kemudian ditindaklanjuti melalui PRM.1.3.2 Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Sekolah yang diarahkan untuk

memperbaiki dan menambah ruang belajar sesuai kebutuhan siswa di berbagai wilayah Kota Pariaman.

Selanjutnya, PRM.1.3.3 Pengadaan Peralatan dan Media Pembelajaran dilakukan untuk mendukung penerapan pembelajaran berbasis teknologi dan mendorong kreativitas peserta didik. Fasilitas pendukung seperti laboratorium, sarana olahraga, dan ruang kegiatan siswa disediakan melalui PRM.1.3.4 Penyediaan Fasilitas Penunjang, agar sekolah menjadi lingkungan yang nyaman dan inspiratif. Proses ini ditutup dengan PRM.1.3.5 Pemeliharaan dan Monitoring Fasilitas Pendidikan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga kualitas sarana pendidikan yang sudah ada.

d. PRM.1.4 Program Literasi Digital untuk Masyarakat (LEVEL 2)



Pelaksanaan proses ini menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat Misi 1 RPJMD Kota Pariaman, yakni "*Mewujudkan SDM masyarakat yang Berkualitas, Beriman, dan Berbudaya.*" Fokus utamanya adalah membangun kemampuan masyarakat untuk memahami, menggunakan, dan mengembangkan teknologi digital secara cerdas dan produktif. Kegiatan dimulai dari PRM.1.4.1 Pemetaan Kebutuhan dan Sasaran Literasi Digital, di mana DISKOMINFO

melakukan kajian lapangan untuk mengidentifikasi tingkat kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi. Hasilnya kemudian dijadikan dasar untuk PRM.1.4.2 Penyusunan Modul dan Materi Literasi Digital yang disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan tiap kelompok masyarakat agar materi yang disampaikan lebih relevan dan mudah diterapkan.

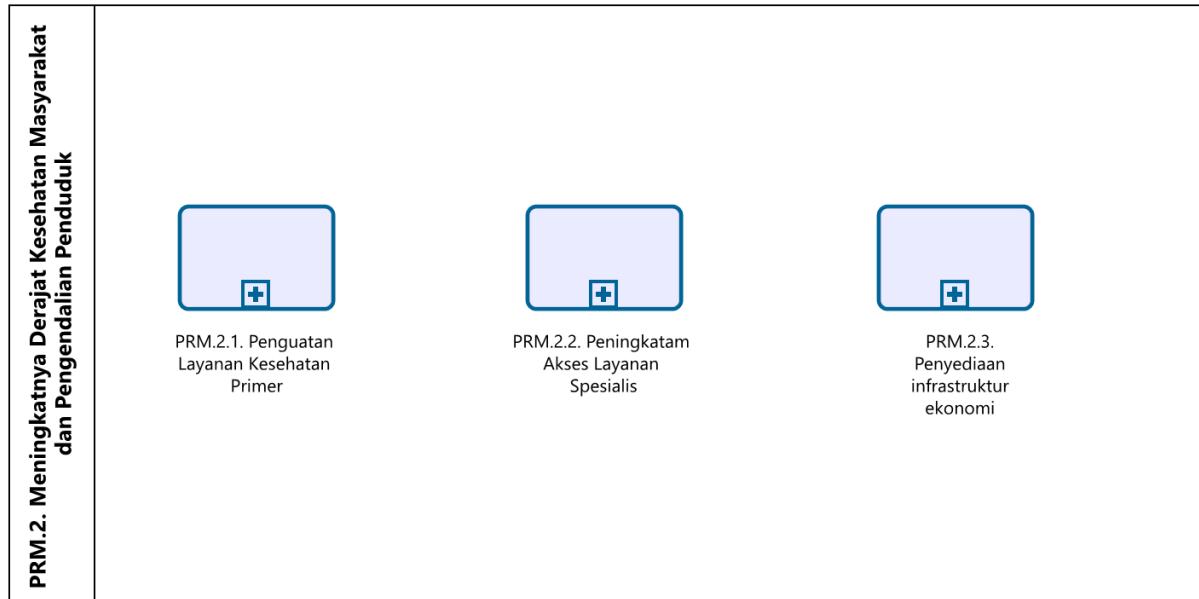
Tahapan berikutnya mencakup PRM.1.4.3 Pelatihan, Workshop, dan Edukasi Literasi Digital sebagai wadah peningkatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan interaktif yang melibatkan narasumber kompeten dan praktik langsung. Dukungan sarana diwujudkan melalui PRM.1.4.4 Penyediaan Infrastruktur Pendukung, seperti jaringan internet publik, pusat pelatihan digital, dan fasilitas multimedia. Proses ini ditutup dengan PRM.1.4.5 Monitoring, Evaluasi, dan Publikasi Program Literasi Digital yang dilakukan secara berkala untuk memastikan keberlanjutan program serta mengukur sejauh mana masyarakat telah bertransformasi menjadi pengguna teknologi yang aktif dan produktif. Seluruh tahapan dalam PRM.1.4 ini mendukung sasaran “*Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Literasi Digital Masyarakat*” sebagaimana termuat dalam Bab III (Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah) serta diperkuat dalam Bab IV (Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah) RPJMD Kota Pariaman 2025–2029.

2. Subproses dan Lintas Fungsi, PRM.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk. (Level 1)

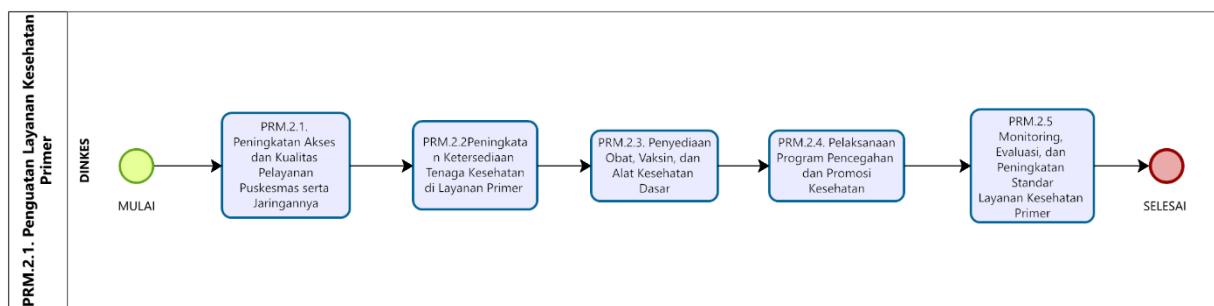
Proses PRM.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia Kota Pariaman yang sehat, produktif, dan berdaya saing, sekaligus mendukung visi kota wisata berbasis budaya. Proses ini mencakup penguatan layanan kesehatan primer di tingkat puskesmas dan fasilitas dasar, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan spesialis bagi masyarakat, serta penyediaan infrastruktur kesehatan yang memadai untuk menunjang pemerataan layanan di seluruh wilayah kota.

Seluruh kegiatan ini saling terintegrasi untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan yang berkualitas, mudah dijangkau, dan berkeadilan. Dalam pelaksanaannya, proses ini memanfaatkan data kesehatan dan kependudukan sebagai dasar perencanaan, berkolaborasi dengan proses pendukung seperti penganggaran, perencanaan pembangunan daerah, serta pengelolaan SDM kesehatan, dan menghasilkan kebijakan

strategis yang berfokus pada peningkatan derajat kesehatan, pengendalian pertumbuhan penduduk, serta optimalisasi layanan kesehatan berkelanjutan di Kota Pariaman.



a. PRM.2.1 Penguatan Layanan Kesehatan Primer (LEVEL 2)

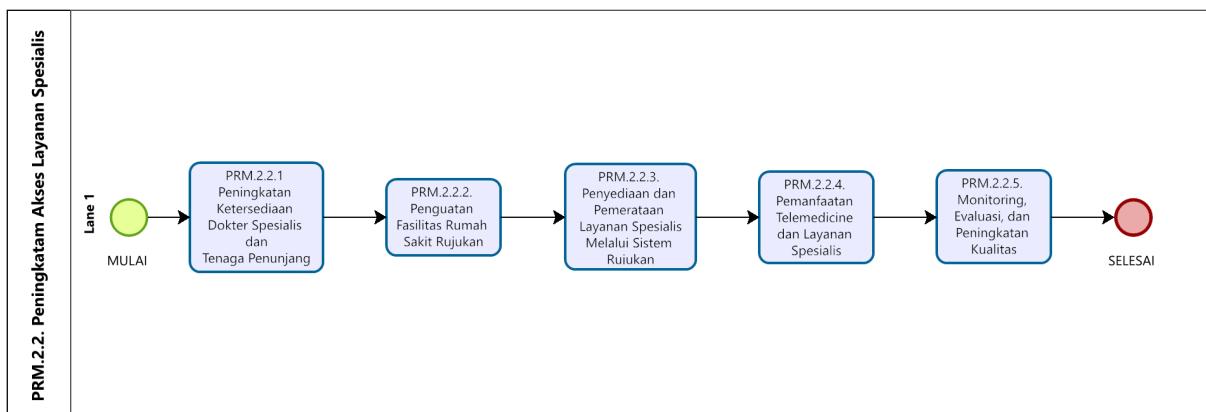


Proses ini merupakan bagian dari pelaksanaan Misi 2 RPJMD Kota Pariaman, yaitu *“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Derajat Kesehatan Masyarakat.”* Fokus utamanya adalah memperkuat sistem layanan kesehatan

dasar agar seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan medis yang cepat, merata, dan berkualitas. Kegiatan dimulai dari PRM.2.1.1 Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Puskesmas serta Jaringannya, yang dilaksanakan oleh DINKES dengan tujuan memperluas jangkauan pelayanan hingga ke wilayah terpencil. Selanjutnya, PRM.2.1.2 Peningkatan Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Layanan Primer dilakukan melalui penempatan tenaga medis dan paramedis sesuai kebutuhan wilayah serta peningkatan kompetensinya agar mampu memberikan pelayanan yang efektif dan humanis.

Tahapan berikutnya, PRM.2.1.3 Penyediaan Obat, Vaksin, dan Alat Kesehatan Dasar, memastikan ketersediaan logistik kesehatan di setiap fasilitas layanan primer agar tidak terjadi kekosongan obat maupun keterlambatan distribusi. Upaya promotif dan preventif masyarakat dilakukan melalui PRM.2.1.4 Pelaksanaan Program Pencegahan dan Promosi Kesehatan, yang berfokus pada edukasi perilaku hidup bersih, imunisasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan. Proses ini ditutup dengan PRM.2.1.5 Monitoring, Evaluasi, dan Peningkatan Standar Layanan Kesehatan Primer untuk menilai capaian mutu layanan serta menentukan langkah perbaikan berkelanjutan. Seluruh tahapan PRM.2.1 berlandaskan arah kebijakan dalam Bab III (Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah) dan Bab IV (Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah) RPJMD Kota Pariaman 2025–2029, dengan sasaran utama *“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Layanan Kesehatan Dasar.”*

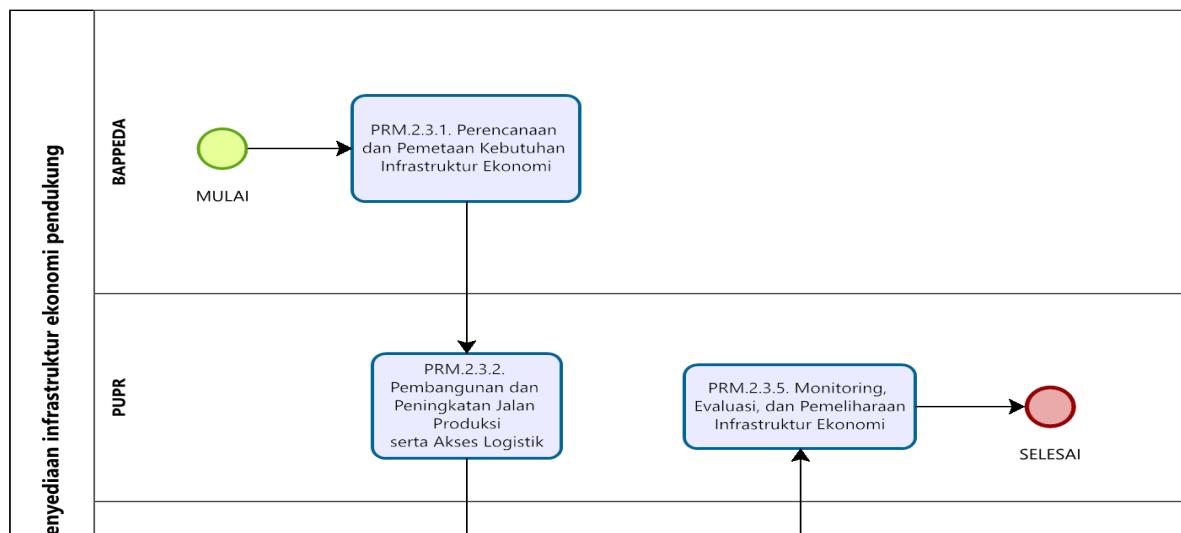
b. PRM.2.2 Peningkatan Akses Layanan Spesialis (LEVEL 2)



Upaya peningkatan mutu kesehatan masyarakat tidak hanya bergantung pada layanan primer, tetapi juga pada ketersediaan layanan spesialis yang cepat, terjangkau, dan merata. Melalui PRM.2.2 ini, pemerintah daerah berkomitmen memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan rujukan yang berkualitas tinggi. Program ini selaras dengan arah kebijakan pada Bab III (Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah) dan Bab IV (Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah) RPJMD Kota Pariaman 2025–2029, khususnya dalam pencapaian sasaran “*Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Layanan Kesehatan Rujukan yang Bermutu.*”

Pelaksanaan proses dimulai dengan PRM.2.2.1 Peningkatan Ketersediaan Dokter Spesialis dan Tenaga Penunjang, yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan tenaga medis spesialis di rumah sakit daerah dan fasilitas kesehatan rujukan. Langkah berikutnya, PRM.2.2.2 Penguatan Fasilitas Rumah Sakit Rujukan, dilakukan untuk meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana agar mampu memberikan pelayanan komprehensif bagi pasien rujukan. Melalui PRM.2.2.3 Penyediaan dan Pemerataan Layanan Spesialis Melalui Sistem Rujukan, pemerintah berupaya memastikan akses masyarakat terhadap layanan lanjutan lebih efisien dan berjenjang. Pemanfaatan teknologi diwujudkan melalui PRM.2.2.4 Pemanfaatan Telemedicine dan Layanan Spesialis, yang mempercepat konsultasi dan penanganan medis jarak jauh. Proses ini diakhiri dengan PRM.2.2.5 Monitoring, Evaluasi, dan Peningkatan Kualitas, guna menjamin keberlanjutan mutu layanan dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Kota Pariaman.

c. PRM.2.3 Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Pendukung (LEVEL 2)

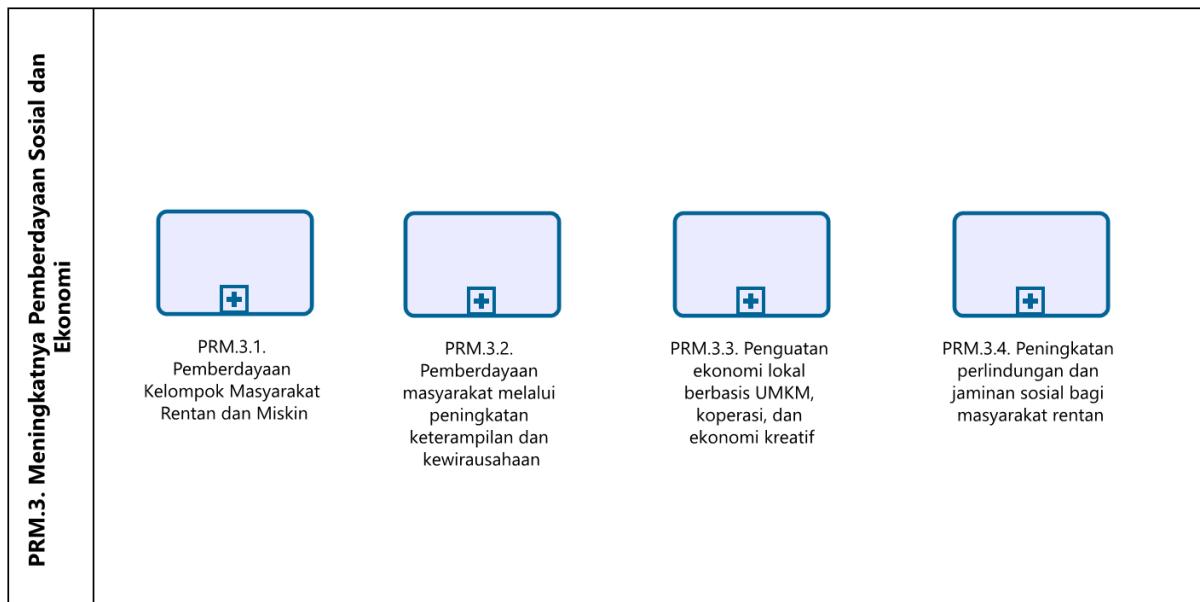


Kegiatan dalam PRM.2.3 ini berfokus pada upaya peningkatan sarana dan prasarana ekonomi untuk menunjang produktivitas masyarakat dan dunia usaha. Proses dimulai dari Bappeda yang melakukan PRM.2.3.1 Perencanaan dan Pemetaan Kebutuhan Infrastruktur Ekonomi, sesuai arah kebijakan pembangunan wilayah dan ekonomi dalam Bab IV RPJMD, khususnya terkait sasaran peningkatan konektivitas dan pemerataan akses antar wilayah. Tahapan ini memastikan bahwa pembangunan dilakukan berbasis kebutuhan aktual dan potensi ekonomi lokal.

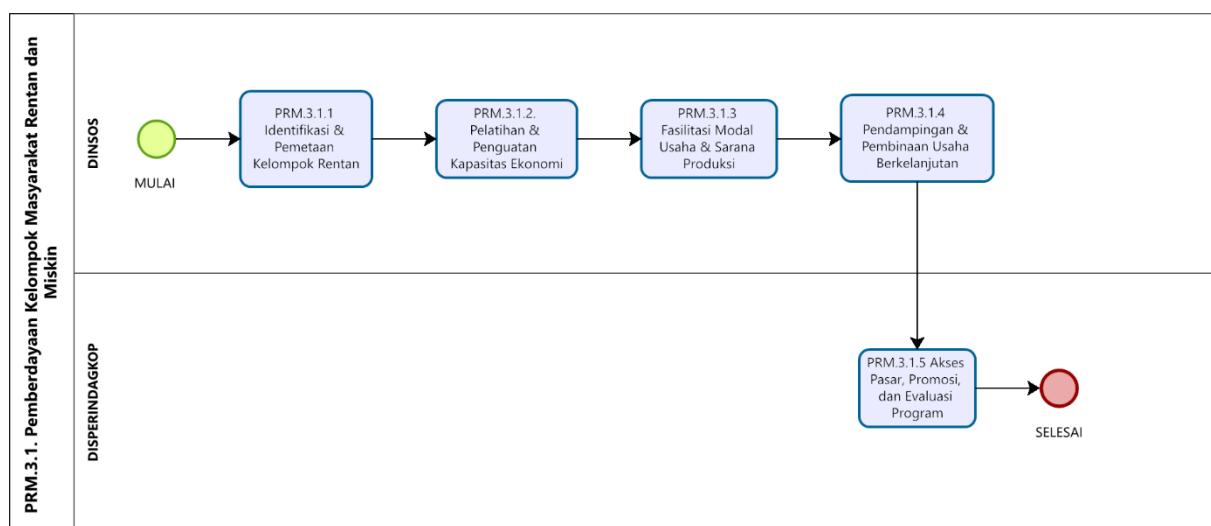
Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan oleh PUPR melalui PRM.2.3.2 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Produksi serta Akses Logistik untuk memperlancar distribusi barang dan jasa. Disperindagkop kemudian berperan dalam PRM.2.3.3 Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi serta PRM.2.3.4 Pengembangan Kawasan Industri dan Sentra Ekonomi. Seluruh rangkaian kegiatan ditutup dengan PRM.2.3.5 Monitoring, Evaluasi, dan Pemeliharaan Infrastruktur Ekonomi, yang memastikan keberlanjutan dan efektivitas hasil pembangunan.

3. Subproses dan Lintas Fungsi, PRM.3. Meningkatnya Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi (Level 1)

Proses PRM.3 Meningkatnya Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi merupakan bagian penting dari strategi pembangunan Kota Pariaman dalam mewujudkan visi sebagai kota wisata berbasis budaya yang mandiri dan berdaya saing. Proses ini berfokus pada penguatan kapasitas masyarakat dan peningkatan kesejahteraan melalui tiga arah kebijakan utama, yaitu pemberdayaan masyarakat lewat peningkatan keterampilan dan kewirausahaan, penguatan ekonomi lokal berbasis UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif, serta peningkatan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan. Seluruh kegiatan dalam proses ini diarahkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing masyarakat lokal dengan tetap menjunjung nilai budaya dan inklusivitas sosial. Proses ini juga bergantung pada kolaborasi lintas perangkat daerah, dunia usaha, dan lembaga keuangan, serta memanfaatkan data sosial-ekonomi daerah sebagai dasar perumusan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan ketahanan sosial ekonomi masyarakat Kota Pariaman.



a. PRM.3.1 Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Rentan dan Miskin (LEVEL 2)

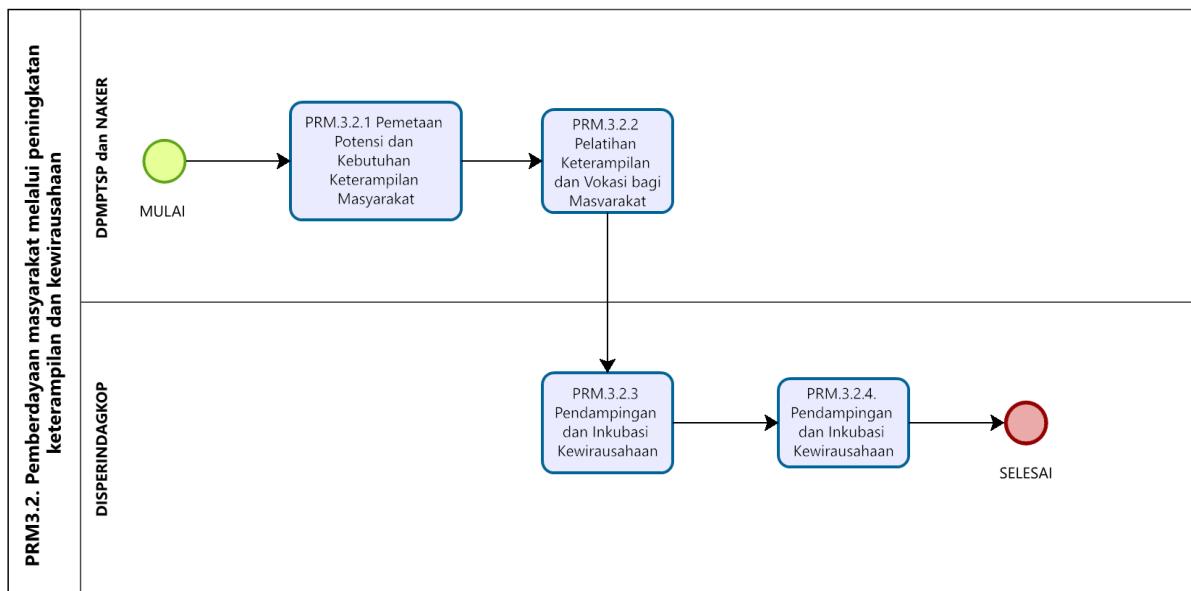


Program ini berorientasi pada penguatan kapasitas sosial dan ekonomi bagi

kelompok masyarakat rentan dan miskin melalui pendekatan yang berkelanjutan serta partisipatif. Kegiatan ini selaras dengan arah kebijakan pembangunan pada Bab III RPJMD Kota Pariaman 2025–2029, khususnya dalam misi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan perlindungan sosial. Dinas Sosial bersama Dinas Perindagkop berperan sebagai pelaksana utama dalam menciptakan masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan memiliki daya saing, dengan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperluas akses terhadap sumber daya, pelatihan, serta dukungan usaha mikro.

Tahapan pelaksanaan dimulai dari PRM.3.1.1 Identifikasi dan Pemetaan Kelompok Rentan, yang bertujuan untuk menentukan sasaran prioritas intervensi berdasarkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Proses dilanjutkan dengan PRM.3.1.2 Pelatihan dan Penguatan Kapasitas Ekonomi, guna meningkatkan keterampilan usaha produktif. Kemudian, PRM.3.1.3 Fasilitasi Modal Usaha dan Sarana Produksi menjadi langkah strategis dalam memperkuat kemampuan wirausaha penerima manfaat. Setelah itu, PRM.3.1.4 Pendampingan dan Pembinaan Usaha Berkelanjutan dilakukan untuk memastikan kelompok binaan mampu bertahan dan berkembang. Tahap terakhir adalah PRM.3.1.5 Akses Pasar, Promosi, dan Evaluasi Program, yang menghubungkan produk usaha masyarakat ke pasar lebih luas sekaligus menilai efektivitas program pemberdayaan. Seluruh rangkaian ini mendukung visi pembangunan Kota Pariaman yang inklusif dan berkeadilan melalui peningkatan kesejahteraan kelompok rentan.

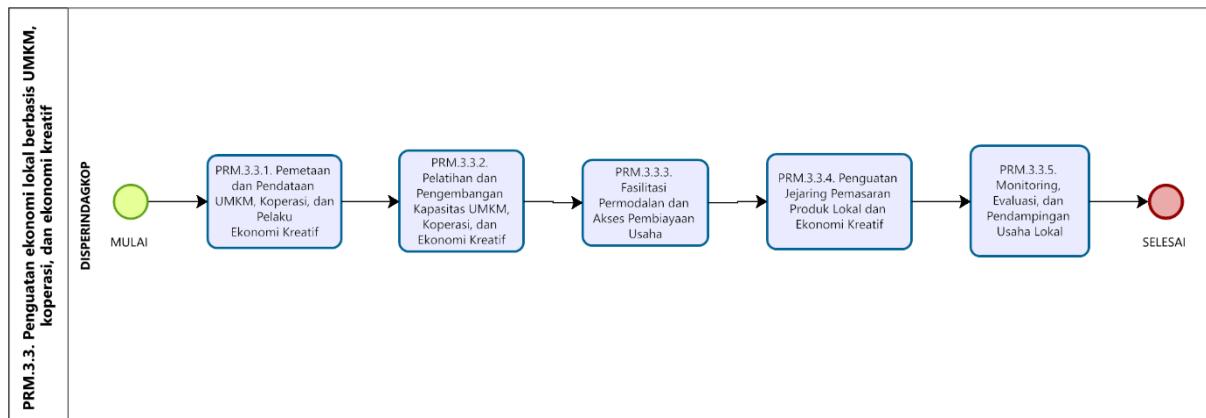
b. PRM.3.2 Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Keterampilan dan Kewirausahaan (LEVEL 2)



Program ini menjadi bagian penting dari pelaksanaan Misi 3 RPJMD Kota Pariaman, yaitu “*Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Berkeadilan.*” Fokus utamanya adalah memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu mengembangkan potensi ekonomi lokal melalui peningkatan keterampilan kerja dan semangat kewirausahaan. Arah kebijakan ini selaras dengan tujuan yang tertuang dalam Bab III (Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah) serta strategi penguatan ekonomi kerakyatan di Bab IV (Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah) RPJMD Kota Pariaman 2025–2029. Pelaksanaan kegiatan diawali oleh DPMPTSP dan NAKER melalui PRM.3.2.1 Pemetaan Potensi dan Kebutuhan Keterampilan Masyarakat untuk mengidentifikasi bidang-bidang keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan potensi unggulan daerah.

Langkah berikutnya adalah PRM.3.2.2 Pelatihan Keterampilan dan Vokasi bagi Masyarakat yang disusun berbasis kebutuhan dunia kerja dan diarahkan pada peningkatan daya saing tenaga kerja lokal. Setelah pelatihan, kegiatan dilanjutkan oleh DISPERINDAGKOP melalui PRM.3.2.3 Pendampingan dan Inkubasi Kewirausahaan, di mana peserta pelatihan mendapatkan pembinaan intensif untuk mengembangkan usaha mandiri. Proses diakhiri dengan PRM.3.2.4 Pendampingan dan Inkubasi Kewirausahaan (lanjutan) yang menekankan pembentukan jejaring bisnis dan akses pembiayaan usaha. Output dari keseluruhan tahapan ini berupa meningkatnya keterampilan masyarakat, bertambahnya wirausaha baru, serta tumbuhnya sentra ekonomi berbasis komunitas di berbagai wilayah Kota Pariaman,

c. PRM.3.3 Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis UMKM, Koperasi, dan Ekonomi Kreatif (LEVEL 2)

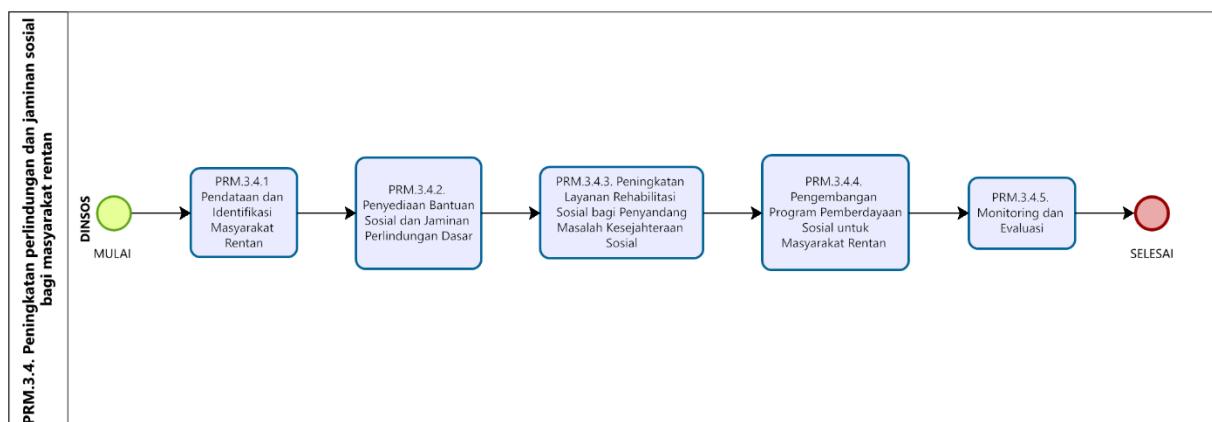


Tujuan utama dari kegiatan ini adalah memperkuat struktur ekonomi daerah melalui pemberdayaan pelaku UMKM, koperasi, dan sektor ekonomi kreatif agar mampu tumbuh mandiri serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan program ini sejalan dengan Bab III (Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah) serta Bab IV (Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah) dalam RPJMD Kota Pariaman 2025–2029, khususnya pada sasaran “*Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat.*” Pelaksanaan program dikoordinasikan oleh DISPERINDAGKOP melalui sinergi lintas sektor yang berorientasi pada penguatan ekonomi berbasis potensi lokal.

Tahapan pelaksanaan dimulai dari PRM.3.3.1 Pemetaan dan Pendataan UMKM, Koperasi, dan Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memperoleh data dan potensi usaha yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pengembangan. Dilanjutkan dengan PRM.3.3.2 Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas UMKM, Koperasi, dan Ekonomi Kreatif guna meningkatkan keterampilan manajerial, inovasi produk, dan kemampuan adaptasi pelaku usaha terhadap pasar digital. Akses pendanaan difasilitasi melalui PRM.3.3.3 Fasilitasi Permodalan dan Akses Pembiasaan Usaha, kemudian diperkuat oleh PRM.3.3.4 Penguatan Jejaring Pemasaran Produk Lokal dan Ekonomi Kreatif agar produk unggulan daerah memiliki pasar yang lebih luas. Seluruh rangkaian kegiatan diakhiri dengan PRM.3.3.5 Monitoring, Evaluasi, dan Pendampingan Usaha Lokal sebagai upaya menjaga keberlanjutan serta peningkatan kinerja usaha masyarakat yang berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman.

d. PRM.3.4 Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Rentan (LEVEL 2)



Upaya ini bertujuan memperkuat sistem perlindungan sosial di Kota Pariaman agar setiap warga, terutama kelompok rentan, memperoleh hak dasar dan layanan

yang layak. Arah kebijakan ini sejalan dengan visi Misi 3 RPJMD Kota Pariaman, yakni “*Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Berkeadilan*”, serta mendukung sasaran sosial yang tercantum dalam Bab III (Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah) dan diperjelas dalam Bab IV (Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah). Pelaksana utama kegiatan ini adalah DINSOS, dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan sosial yang inklusif dan berkeadilan.

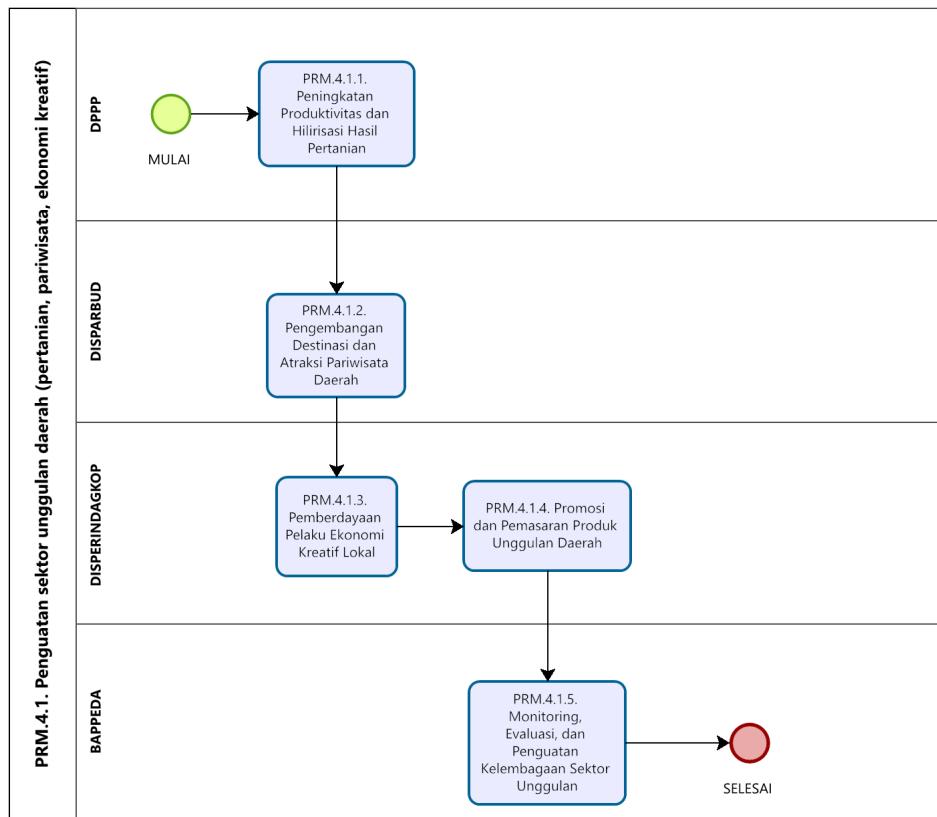
Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan PRM.3.4.1 Pendataan dan Identifikasi Masyarakat Rentan, yang berfungsi memetakan kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial, seperti lansia, penyandang disabilitas, anak terlantar, dan keluarga miskin. Berdasarkan hasil pendataan tersebut, dilakukan PRM.3.4.2 Penyediaan Bantuan Sosial dan Jaminan Perlindungan Dasar agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Tahapan berikutnya, PRM.3.4.3 Peningkatan Layanan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, berfokus pada pemulihan fungsi sosial dan peningkatan kemandirian penerima manfaat. Kemudian, PRM.3.4.4 Pengembangan Program Pemberdayaan Sosial untuk Masyarakat Rentan diarahkan untuk membangun kemampuan ekonomi dan sosial kelompok sasaran. Seluruh rangkaian kegiatan diakhiri dengan PRM.3.4.5 Monitoring dan Evaluasi untuk memastikan efektivitas program dan ketepatan sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan perlindungan.

4. Subproses dan Lintas Fungsi, PRM.4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sektor unggulan dan investasi (Level 1)

Peta proses bisnis PRM.4 “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Sektor Unggulan dan Investasi” menggambarkan fokus strategis Pemerintah Kota Pariaman dalam RPJMD 2025–2029 untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah melalui tiga arah utama. Pertama, penguatan sektor unggulan daerah seperti pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai pendorong utama peningkatan produktivitas dan nilai tambah lokal. Kedua, peningkatan iklim investasi dan pembangunan infrastruktur pendukung untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan menarik bagi investor, baik dari dalam maupun luar daerah. Ketiga, pengembangan UMKM dan peningkatan daya saing ekonomi lokal sebagai upaya mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, proses bisnis ini mendukung arah kebijakan RPJMD yang menitikberatkan pada transformasi ekonomi daerah berbasis potensi lokal, inovasi, serta kemandirian masyarakat dalam memperkuat ketahanan ekonomi Kota Pariaman.

<p>PRM.4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sektor unggulan dan investasi</p>	 <p>PRM.4.1. Penguatan sektor unggulan daerah (pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif)</p>	 <p>PRM.4.2. Peningkatan iklim investasi dan infrastruktur pendukung</p>	 <p>PRM.4.3. Pengembangan UMKM dan daya saing ekonomi lokal</p>
---	---	---	--

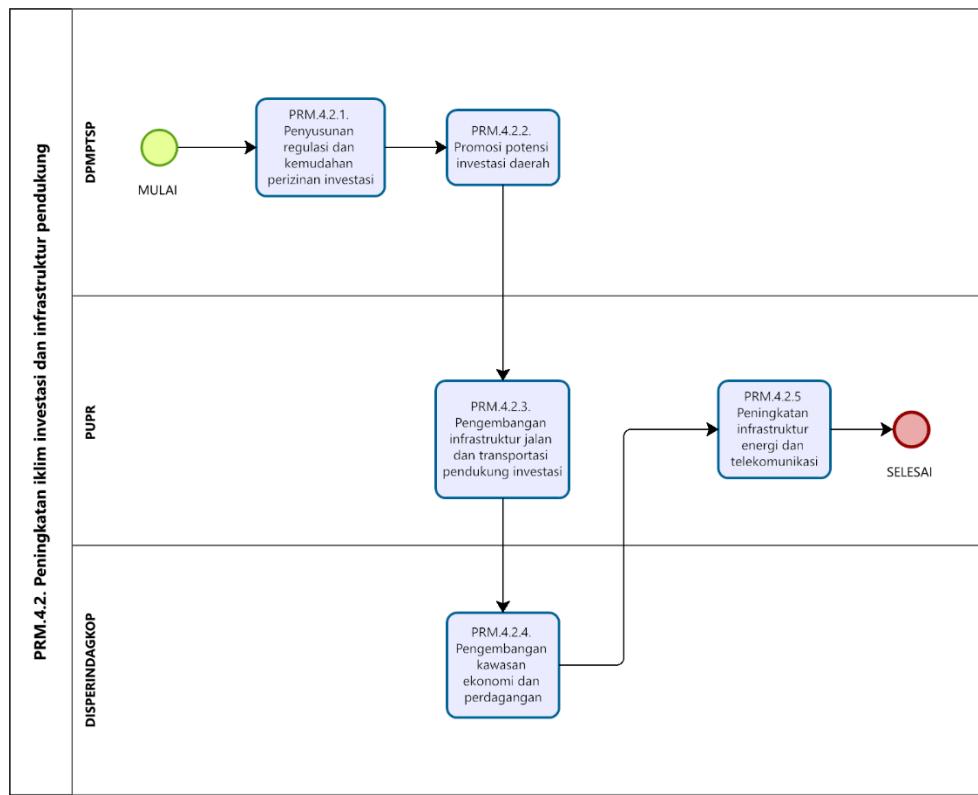
- a. **PRM.4.1 Penguatan Sektor Unggulan Daerah (Pertanian, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif) (LEVEL 2)**



Program ini berperan sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi Kota Pariaman yang bertumpu pada potensi lokal seperti pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Arah kebijakan PRM.4. Fokus kegiatan selaras dengan strategi pembangunan yang tertuang dalam Bab III (Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah) dan Bab IV (Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah) RPJMD Kota Pariaman 2025–2029.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan PRM.4.1.1 Peningkatan Produktivitas dan Hilirisasi Hasil Pertanian oleh DPBP, yang menekankan inovasi budidaya serta pengolahan hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah. Tahapan berikutnya dilaksanakan oleh DISPARBUD melalui PRM.4.1.2 Pengembangan Destinasi dan Atraksi Pariwisata Daerah, dengan fokus menciptakan daya tarik wisata baru berbasis budaya dan alam. Kemudian, DISPERINDAGKOP berperan dalam PRM.4.1.3 Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif Lokal, yang mendorong munculnya wirausaha baru berbasis kreativitas dan produk lokal unggulan. Untuk memperluas jangkauan pasar, dilaksanakan PRM.4.1.4 Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah, baik secara daring maupun melalui pameran dan festival daerah. Seluruh proses diakhiri dengan PRM.4.1.5 Monitoring, Evaluasi, dan Penguatan Kelembagaan Sektor Unggulan oleh BAPPEDA.

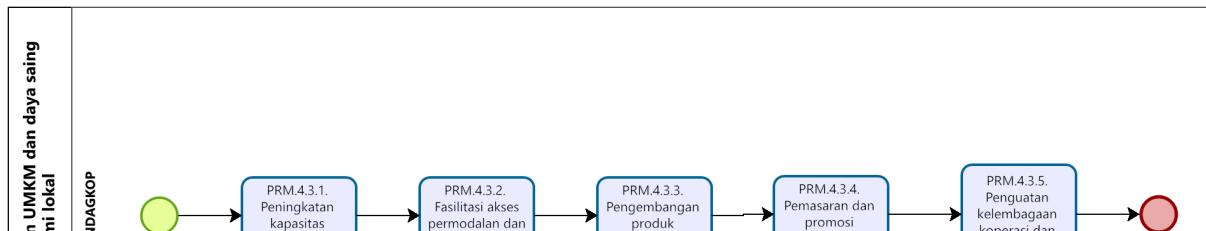
b. PRM.4.2 Peningkatan Iklim Investasi dan Infrastruktur Pendukung (LEVEL 2)



Arah kebijakan ini mendukung pencapaian Misi 4 RPJMD Kota Pariaman, yaitu “*Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Ekonomi Daerah melalui Penguatan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Ekonomi*,” sebagaimana tercantum dalam Bab III (Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah) serta diperkuat pada Bab IV (Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah).

Tahapan pelaksanaan dimulai oleh DPMPTSP melalui PRM.4.2.1 Penyusunan Regulasi dan Kemudahan Perizinan Investasi, guna menciptakan sistem pelayanan yang cepat, transparan, dan ramah investor. Langkah berikutnya, PRM.4.2.2 Promosi Potensi Investasi Daerah, dilakukan untuk memperkenalkan peluang investasi di berbagai sektor unggulan kepada calon investor regional maupun nasional. Dukungan infrastruktur diwujudkan melalui PRM.4.2.3 Pengembangan Infrastruktur Jalan dan Transportasi Pendukung Investasi yang dilaksanakan oleh PUPR, diikuti dengan PRM.4.2.4 Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Perdagangan oleh DISPERINDAGKOP guna memfasilitasi kegiatan industri dan distribusi produk lokal. Seluruh kegiatan ini diperkuat dengan PRM.4.2.5 Peningkatan Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi, yang berperan penting dalam menjamin keberlanjutan dan efisiensi operasional kegiatan ekonomi.

c. PRM.4.3 Pengembangan UMKM dan Daya Saing Ekonomi Lokal (LEVEL 2)



Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat perekonomian daerah melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar lebih berdaya saing dan adaptif terhadap perubahan pasar. Program ini menjadi bagian dari implementasi Misi 4 RPJMD Kota Pariaman, yaitu “*Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Ekonomi Daerah melalui Penguatan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Ekonomi.*” Arah kebijakan tersebut dijabarkan secara rinci dalam Bab III (Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah) serta Bab IV (Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah) RPJMD Kota Pariaman 2025–2029, yang menekankan pada penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Pelaksana utama kegiatan ini adalah DISPERINDAGKOP yang berperan dalam mendorong UMKM menjadi lebih produktif, inovatif, dan mandiri.

Proses pelaksanaan dimulai dengan PRM.4.3.1 Peningkatan Kapasitas Pelaku UMKM, yang menitikberatkan pada pelatihan manajerial, literasi keuangan, dan peningkatan kualitas produk. Tahapan berikutnya, PRM.4.3.2 Fasilitasi Akses Permodalan dan Pembiayaan, membuka peluang bagi pelaku usaha kecil untuk memperoleh dukungan keuangan dari lembaga perbankan maupun non-bank. Setelah itu, PRM.4.3.3 Pengembangan Produk Unggulan Lokal berfokus pada diversifikasi produk berbasis potensi daerah agar memiliki nilai jual lebih tinggi. Selanjutnya, PRM.4.3.4 Pemasaran dan Promosi Produk UMKM dilaksanakan melalui pameran, platform digital, dan kerja sama antar daerah untuk memperluas jangkauan pasar. Rangkaian kegiatan ditutup dengan PRM.4.3.5 Penguatan Kelembagaan Koperasi dan Kelompok Usaha, sebagai langkah membangun sinergi antar pelaku ekonomi lokal agar lebih tangguh dan berkelanjutan. Dengan tahapan ini, PRM.4.3 diharapkan mampu memperkokoh fondasi ekonomi masyarakat Kota Pariaman berbasis kreativitas dan kemandirian lokal.

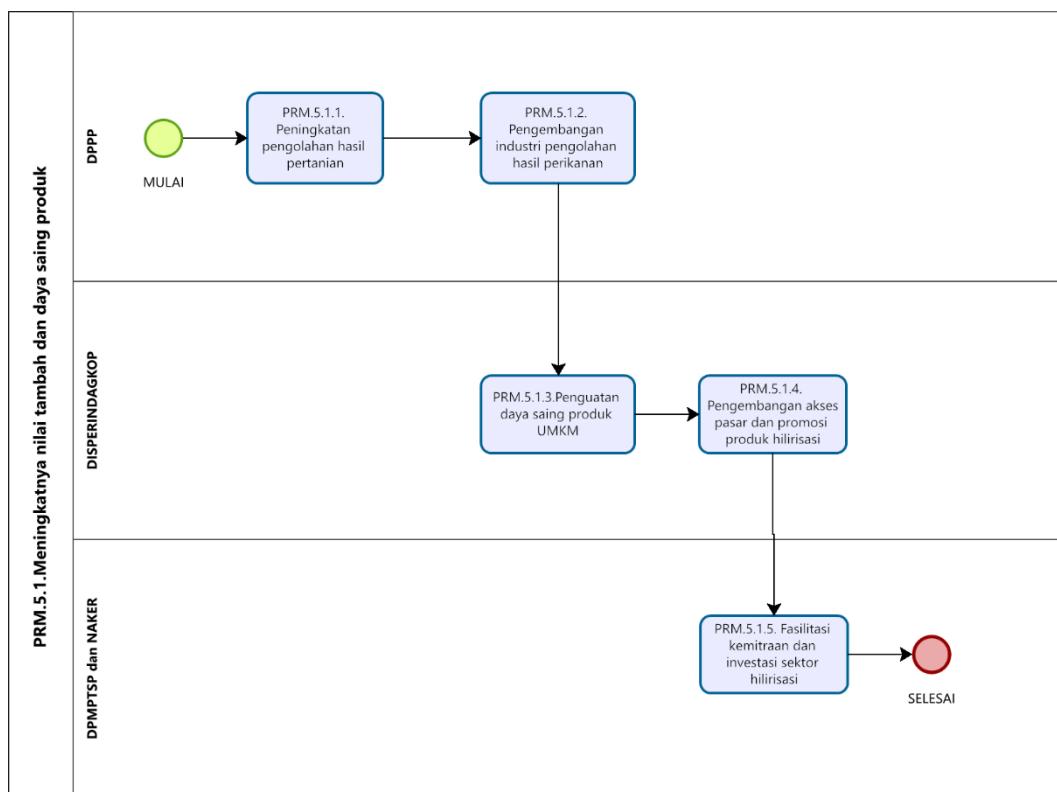
5. Subproses dan Lintas Fungsi, PRM.5. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian, perikanan, UMKM, dan ekonomi kreatif (Level 1)

Peta proses bisnis PRM.5 “Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian, Perikanan, UMKM, dan Ekonomi Kreatif” mencerminkan strategi Pemerintah Kota Pariaman dalam RPJMD 2025–2029 untuk memperkuat sektor produktif berbasis potensi lokal melalui peningkatan kualitas dan daya saing produk unggulan daerah. Upaya ini dilakukan melalui tiga langkah utama: penguatan hilirisasi sektor pertanian, perikanan, dan UMKM untuk menciptakan produk olahan bernilai tambah; sertifikasi, standarisasi, dan branding produk lokal guna meningkatkan kepercayaan pasar dan identitas produk Pariaman; serta fasilitasi pemasaran digital dan akses pasar regional, nasional, hingga internasional untuk memperluas jangkauan usaha masyarakat. Sinergi dari ketiga komponen ini bertujuan mewujudkan struktur ekonomi daerah yang tangguh,

inovatif, dan berdaya saing tinggi sesuai dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam RPJMD Kota Pariaman 2025–2029.

PRM.5. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian, perikanan, UMKM, dan ekonomi krea			
	PRM.5.1. Penguatan hilirisasi sektor pertanian, perikanan, dan UMKM.	PRM.5.2. Sertifikasi, standarisasi, dan branding produk lokal.	PRM.5.3. Fasilitasi pemasaran digital dan akses ke pasar regional/nasional/internasional.

a. **PRM.5.1 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk (LEVEL 2)**



Program ini menjadi bagian penting dalam penguatan struktur ekonomi daerah melalui pengembangan sektor pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan industri kreatif berbasis potensi lokal. Kegiatan ini mendukung pencapaian Misi 5 RPJMD Kota Pariaman, sebagaimana dijabarkan dalam Bab III (Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah) serta Bab IV (Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah) RPJMD Kota Pariaman 2025–2029.

Pelaksanaan kegiatan dimulai oleh DPPP melalui PRM.5.1.1 Peningkatan Pengolahan Hasil Pertanian, yang menitikberatkan pada inovasi teknologi pengolahan dan peningkatan produktivitas pascapanen. Selanjutnya, PRM.5.1.2 Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan diarahkan untuk memperkuat sektor maritim dan memperluas pasar hasil laut olahan. Tahapan berikutnya, PRM.5.1.3 Penguatan Daya Saing Produk UMKM, yang dilaksanakan oleh DISPERINDAGKOP, berfokus pada peningkatan mutu, desain, dan kemasan produk agar mampu bersaing di pasar modern. Proses berlanjut ke PRM.5.1.4 Pengembangan Akses Pasar dan Promosi Produk Hilirisasi, yang membuka peluang kerja sama dagang dan pameran promosi di tingkat lokal hingga nasional. Seluruh kegiatan didukung oleh DPMPTSP dan NAKER melalui PRM.5.1.5 Fasilitasi Kemitraan dan Investasi Sektor Hilirisasi,

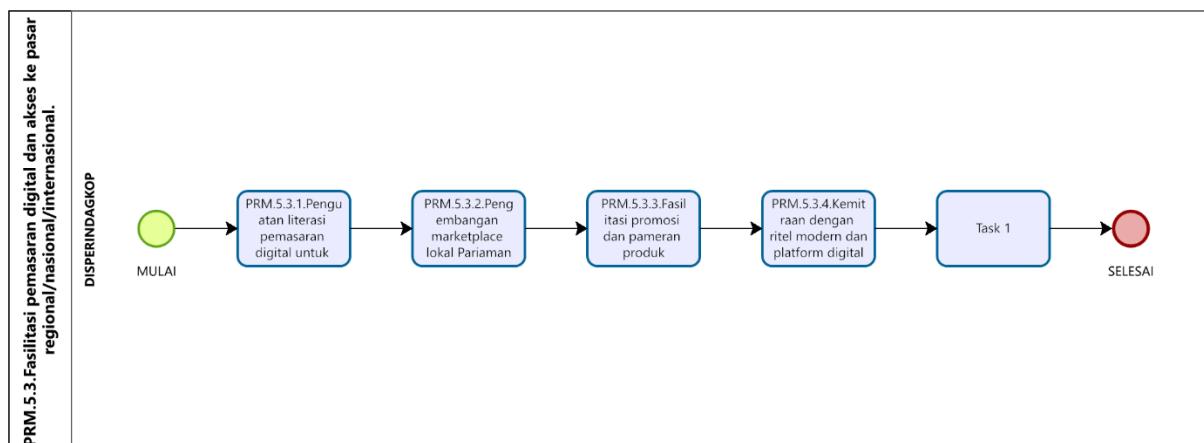
b. PRM.5.2 Sertifikasi, Standardisasi, dan Branding Produk Lokal (LEVEL 2)

, dan branding produk KOP	
----------------------------------	--

Program ini berfokus pada peningkatan daya saing produk lokal Kota Pariaman melalui penerapan standar mutu, penguatan citra produk, serta perluasan jejaring pemasaran. Arah kebijakan kegiatan ini selaras dengan sasaran pembangunan ekonomi yang tertuang dalam Bab III (Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah) dan Bab IV (Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah) RPJMD Kota Pariaman 2025–2029, yang menekankan pada peningkatan kualitas serta nilai tambah produk unggulan daerah. Pelaksana utama kegiatan ini adalah DISPERINDAGKOP, yang bertanggung jawab mengoptimalkan peran pelaku UMKM agar mampu menghasilkan produk berkualitas dan berdaya saing tinggi di pasar yang lebih luas.

Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan PRM.5.2.1 Fasilitasi Sertifikasi Produk Lokal untuk membantu pelaku usaha memperoleh pengakuan legal dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Tahapan berikutnya, PRM.5.2.2 Penerapan Standar Mutu dan Keamanan Produk, menjamin konsistensi dan keamanan produk yang beredar di pasaran. Kemudian dilakukan PRM.5.2.3 Pengembangan Desain dan Kemasan Produk guna memperkuat karakter dan nilai estetika produk lokal. Proses berlanjut pada PRM.5.2.4 Branding dan Promosi Produk Lokal, yang mendorong terbentuknya identitas merek khas Kota Pariaman serta memperluas eksposur melalui promosi kreatif. Keseluruhan kegiatan diakhiri dengan PRM.5.2.5 Penguatan Jejaring Pemasaran Produk, yang berfungsi membangun koneksi antar pelaku usaha dan memperkuat rantai distribusi. Melalui tahapan ini, produk-produk lokal diharapkan tidak hanya berdaya saing secara nasional, tetapi juga menjadi representasi kualitas unggulan daerah.

c. PRM.5.3 Sertifikasi, Standardisasi, dan Branding Produk Lokal (LEVEL 2)



Program ini diarahkan untuk memperluas jangkauan pemasaran produk lokal Kota Pariaman melalui pemanfaatan teknologi digital dan kemitraan strategis. Kegiatan ini mendukung sasaran pembangunan ekonomi kreatif dan peningkatan daya saing produk daerah sebagaimana tertuang dalam Bab III (Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah) serta Bab IV (Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah) RPJMD Kota Pariaman 2025–2029. Melalui pendekatan digitalisasi pemasaran, diharapkan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif dapat menembus pasar yang lebih luas, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Tahapan kegiatan dimulai dari PRM.5.3.1 Penguatan Literasi Pemasaran Digital untuk Pelaku Usaha, yang bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam menggunakan media digital untuk promosi dan penjualan produk. Selanjutnya, PRM.5.3.2 Pengembangan Marketplace Lokal Pariaman menjadi langkah strategis dalam menyediakan wadah e-commerce berbasis daerah yang mempertemukan produsen dan konsumen secara langsung. Peningkatan eksposur produk dilakukan melalui PRM.5.3.3 Fasilitasi Promosi dan Pameran Produk, baik secara daring maupun luring. Kemudian, PRM.5.3.4 Kemitraan dengan Ritel Modern dan Platform Digital dilaksanakan untuk membuka peluang kerja sama distribusi produk lokal ke pasar nasional dan internasional. Seluruh rangkaian kegiatan ini saling terintegrasi untuk memperkuat posisi produk unggulan Kota Pariaman di era ekonomi digital, sekaligus mempercepat transformasi UMKM menuju ekosistem bisnis yang adaptif dan berdaya saing tinggi.

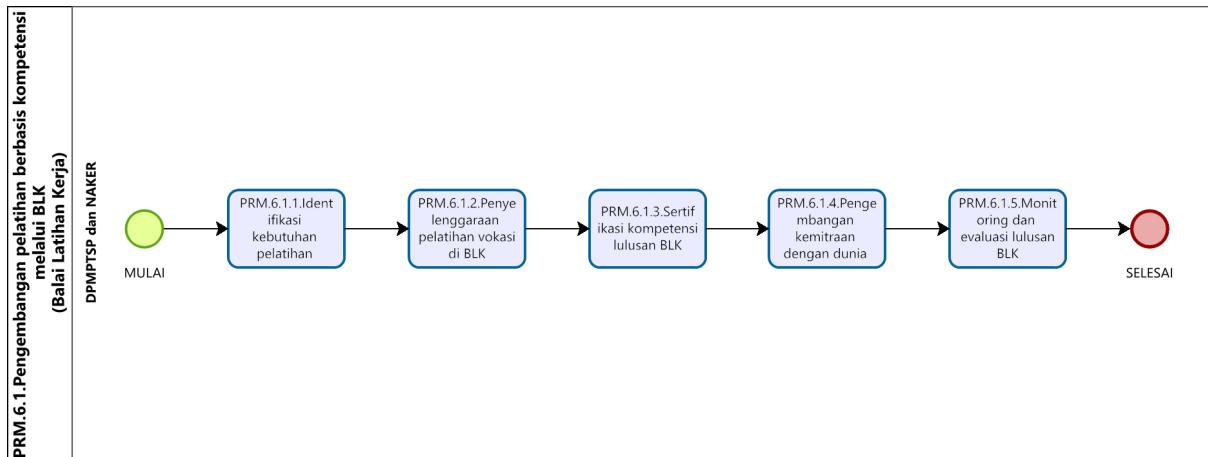
6. Subproses dan Lintas Fungsi, PRM.6. Meningkatnya kesempatan kerja dan kualitas tenaga kerja (Level 1)

Peta proses bisnis PRM.6 “Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Kualitas Tenaga Kerja” menggambarkan upaya Pemerintah Kota Pariaman dalam RPJMD 2025–2029 untuk memperkuat daya saing sumber daya manusia serta memperluas akses lapangan kerja yang produktif. Strategi ini diwujudkan melalui tiga fokus utama, yaitu pengembangan pelatihan berbasis kompetensi melalui Balai Latihan Kerja (BLK) guna meningkatkan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar; sinkronisasi pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri (link and match) agar lulusan memiliki relevansi keterampilan yang tinggi terhadap dunia kerja; serta pengembangan program wirausaha baru bagi generasi muda dan perempuan sebagai langkah konkret mendorong kemandirian ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru. Keseluruhan proses ini mendukung visi RPJMD untuk

membentuk tenaga kerja Kota Pariaman yang kompeten, berdaya saing, dan adaptif terhadap perubahan ekonomi modern.

<p>PRM.6.Meningkatnya kesempatan kerja dan kualitas tenaga kerja</p>	 PRM.6.1."Pengembangan pelatihan berbasis kompetensi melalui BLK (Balai Latihan Kerja)."	 PRM.6.2.Link and match pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri.	 PRM.6.3.Program wirausaha baru, khususnya generasi muda dan perempuan.
---	--	--	---

a. PRM.6.1 Pengembangan pelatihan berbasis kompetensi melalui BLK (LEVEL

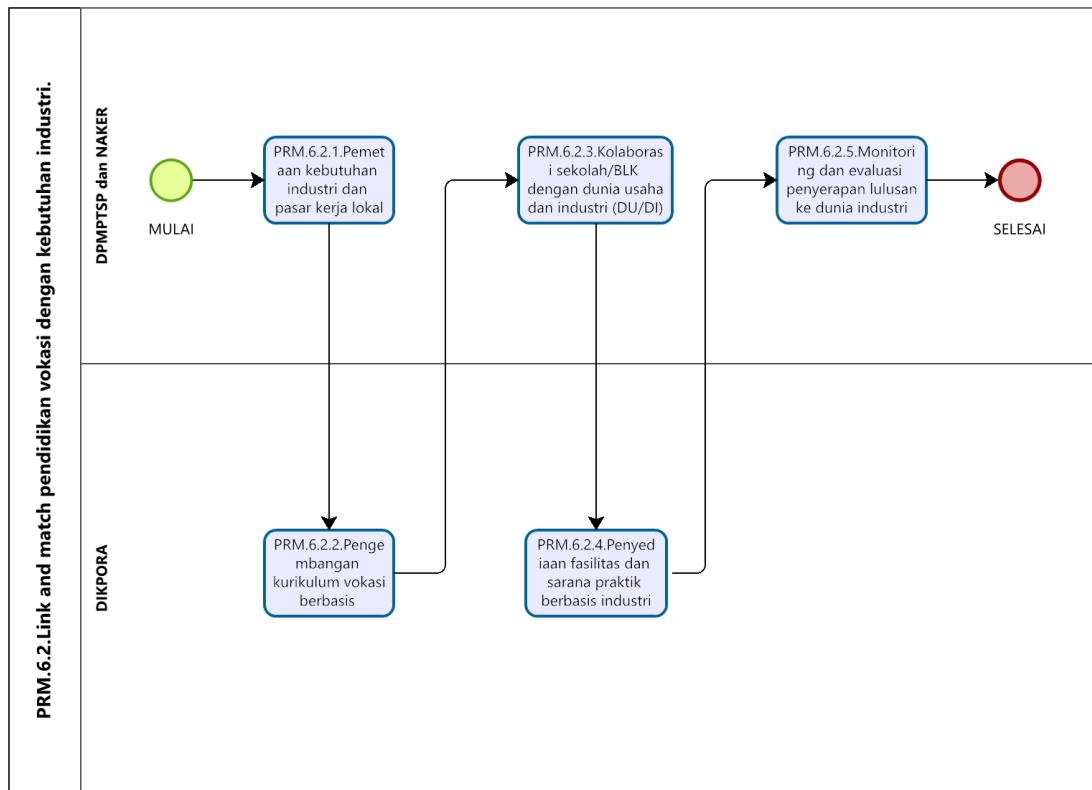


2)

Program ini berfokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja Kota Pariaman melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Arah kebijakan PRM.6.1 ini mendukung pencapaian sasaran pembangunan pada Bab III (Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah) serta memperkuat strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana tertuang dalam Bab IV (Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah) RPJMD Kota Pariaman 2025–2029. Melalui program ini, DPMPTSP dan NAKER berperan penting dalam menciptakan tenaga kerja yang terampil, adaptif terhadap teknologi, dan siap bersaing di dunia kerja.

Tahapan pelaksanaan dimulai dari PRM.6.1.1 Identifikasi Kebutuhan Pelatihan, yang dilakukan untuk memetakan jenis keahlian yang dibutuhkan oleh industri dan dunia kerja. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, PRM.6.1.2 Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi di BLK dilaksanakan dengan menyesuaikan kurikulum pelatihan terhadap kebutuhan sektor prioritas daerah. Setelah peserta menyelesaikan pelatihan, dilakukan PRM.6.1.3 Sertifikasi Kompetensi Lulusan BLK guna memberikan pengakuan resmi atas keterampilan yang dimiliki. Tahapan selanjutnya adalah PRM.6.1.4 Pengembangan Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri, yang membuka peluang kerja serta memperkuat kolaborasi antara BLK dan sektor swasta. Seluruh proses ini ditutup dengan PRM.6.1.5 Monitoring dan Evaluasi Lulusan BLK untuk memastikan keberhasilan pelatihan serta meningkatkan efektivitas program di periode berikutnya. Melalui rangkaian kegiatan ini, PRM.6.1 diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja Pariaman sekaligus memperkuat daya saing ekonomi daerah secara berkelanjutan.

b. PRM.6.2 Link and Match Pendidikan Vokasi dengan Kebutuhan Industri (LEVEL 2)

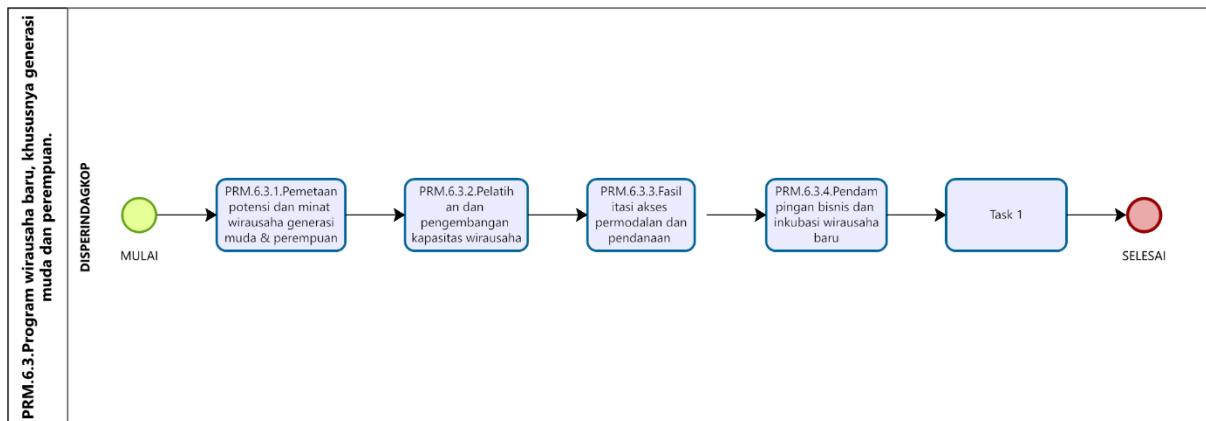


Bab IV RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025–2029, yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan perkembangan ekonomi lokal dan global. Program ini juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan pada Bab III, khususnya dalam upaya menciptakan tenaga kerja terampil yang siap terserap oleh pasar kerja.

Pelaksanaan program dimulai dari PRM.6.2.1 Pemetaan Kebutuhan Industri dan Pasar Kerja Lokal, yang dilakukan oleh DPMPTSP dan NAKER untuk mengidentifikasi sektor industri potensial dan jenis kompetensi yang dibutuhkan di daerah. Hasil pemetaan ini menjadi dasar bagi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (DIKPORA) dalam PRM.6.2.2 Pengembangan Kurikulum Vokasi Berbasis Industri, yang menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI). Selanjutnya, PRM.6.2.3 Kolaborasi Sekolah/BLK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri dilakukan guna memperkuat sinergi antara lembaga pendidikan dan sektor produktif. Untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran yang lebih aplikatif, dilakukan PRM.6.2.4 Penyediaan Fasilitas dan Sarana Praktik Berbasis Industri, agar peserta didik dapat memperoleh pengalaman praktik yang sesuai dengan standar kerja industri. Tahapan terakhir yaitu PRM.6.2.5 Monitoring dan Evaluasi

Penyerapan Lulusan ke Dunia Industri, yang berfungsi menilai efektivitas program dan memastikan lulusan vokasi benar-benar terserap di pasar kerja

c. **PRM.6.3 Program Wirausaha Baru, Khususnya Generasi Muda dan Perempuan (LEVEL 2)**



Program ini berfokus pada penguatan ekosistem kewirausahaan di Kota Pariaman dengan menitikberatkan pada peningkatan partisipasi generasi muda dan perempuan dalam dunia usaha. Arah kebijakan PRM.6.3 ini berkaitan erat dengan Bab IV RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025–2029, yang menegaskan pentingnya penciptaan lapangan kerja baru serta pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kewirausahaan. Program ini juga mendukung Bab III RPJMD, terutama dalam sasaran peningkatan kemandirian ekonomi daerah melalui pertumbuhan wirausaha produktif.

Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan PRM.6.3.1 Pemetaan Potensi dan Minat Wirausaha Generasi Muda dan Perempuan, yang dilaksanakan oleh DISPERINDAGKOP guna mengidentifikasi potensi wilayah, minat, serta sektor usaha yang prospektif. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar bagi PRM.6.3.2 Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Wirausaha, di mana calon pelaku usaha diberikan pembekalan keterampilan manajerial, teknis, dan digital. Selanjutnya, PRM.6.3.3 Fasilitasi Akses Permodalan dan Pendanaan disiapkan untuk membantu wirausaha baru memperoleh dukungan finansial yang dibutuhkan dalam memulai atau mengembangkan usaha.

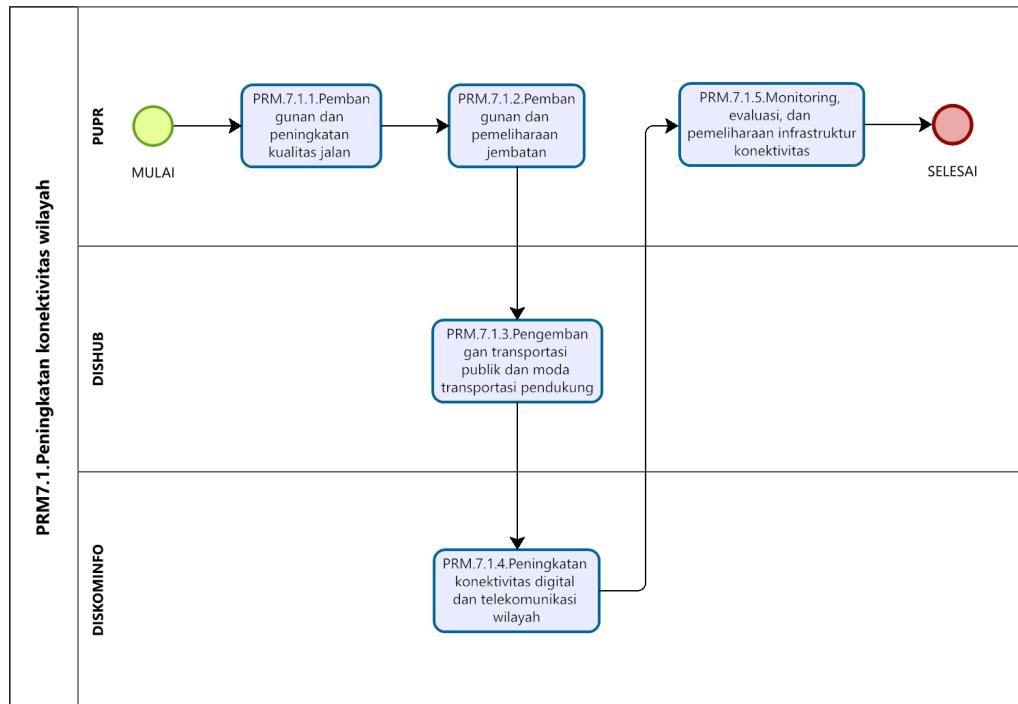
Tahapan berikutnya yaitu PRM.6.3.4 Pendampingan Bisnis dan Inkubasi Wirausaha Baru, yang berperan penting dalam memastikan keberlanjutan usaha melalui mentoring, jejaring usaha, serta penguatan kapasitas bisnis. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan wirausaha muda dan perempuan dapat berkembang menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing tinggi.

7. Subproses dan Lintas Fungsi, PRM.7. Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah (Level 1)

Subproses peta berfokus pada peningkatan kualitas infrastruktur wilayah menggambarkan peran strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui sinergi antara peningkatan konektivitas, penyediaan sarana publik yang layak, serta pengembangan infrastruktur ekonomi lokal, proses ini menjadi fondasi utama dalam memperkuat pertumbuhan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kolaborasi lintas perangkat daerah, efisiensi perencanaan dan penganggaran, serta dukungan masyarakat, sehingga Kota Pariaman mampu mencapai tujuan pembangunan yang merata, berwawasan lingkungan, dan mendukung visi kota yang maju serta berkelanjutan.

PRM.7.Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah			
			
	PRM.7.1.Peningkatan konektivitas wilayah	PRM.7.2.Penyediaan sarana dan prasarana publik yang layak	PRM.7.3.Pengembangan infrastruktur pendukung ekonomi

a. PRM.7.1 Peningkatan Konektivitas Wilayah (LEVEL 2)



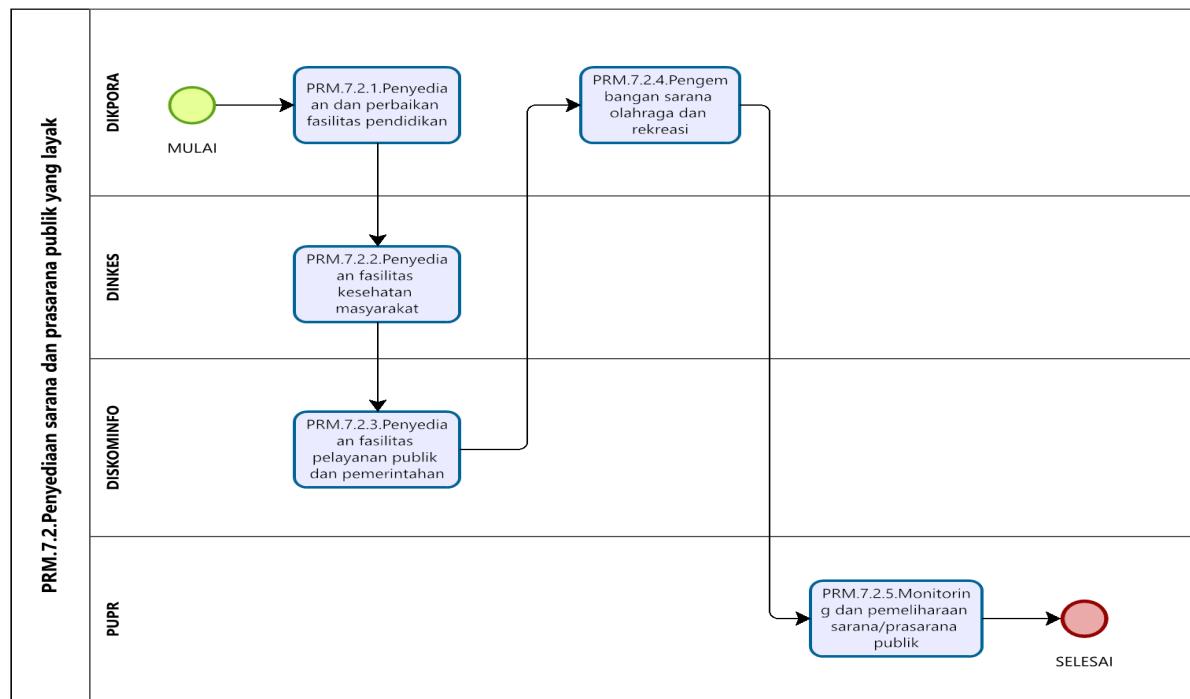
Upaya peningkatan konektivitas wilayah di Kota Pariaman menjadi langkah strategis dalam memperkuat daya saing daerah dan memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat. Program PRM.7.1 ini memiliki keterkaitan langsung dengan Bab IV RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025–2029, yang menekankan pembangunan infrastruktur sebagai pendorong pertumbuhan wilayah dan pemerataan pembangunan. Selain itu, program ini mendukung arah kebijakan Bab III RPJMD, terutama dalam mewujudkan sistem transportasi dan jaringan komunikasi yang terintegrasi antarwilayah.

Pelaksanaan PRM.7.1 dimulai dengan PRM.7.1.1 Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Jalan oleh Dinas PUPR, sebagai dasar peningkatan aksesibilitas antarwilayah dan kelancaran arus barang serta jasa. Kegiatan dilanjutkan melalui PRM.7.1.2 Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan, guna menjamin konektivitas fisik yang aman dan berkelanjutan. Selanjutnya, Dinas Perhubungan (DISHUB) melaksanakan PRM.7.1.3 Pengembangan Transportasi Publik dan Moda Transportasi Pendukung sebagai bentuk penyediaan layanan mobilitas masyarakat yang efisien dan ramah lingkungan.

Tak hanya infrastruktur darat, PRM.7.1.4 Peningkatan Konektivitas Digital dan Telekomunikasi Wilayah oleh Diskominfo menjadi langkah penting dalam memperluas jaringan informasi dan transformasi digital di daerah. Seluruh kegiatan kemudian ditindaklanjuti melalui PRM.7.1.5 Monitoring, Evaluasi, dan

Pemeliharaan Infrastruktur Konektivitas, sebagai upaya menjaga keberlanjutan fungsi dan kualitas sarana prasarana yang telah dibangun.

b. PRM.7.2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik yang Layak (LEVEL 2)

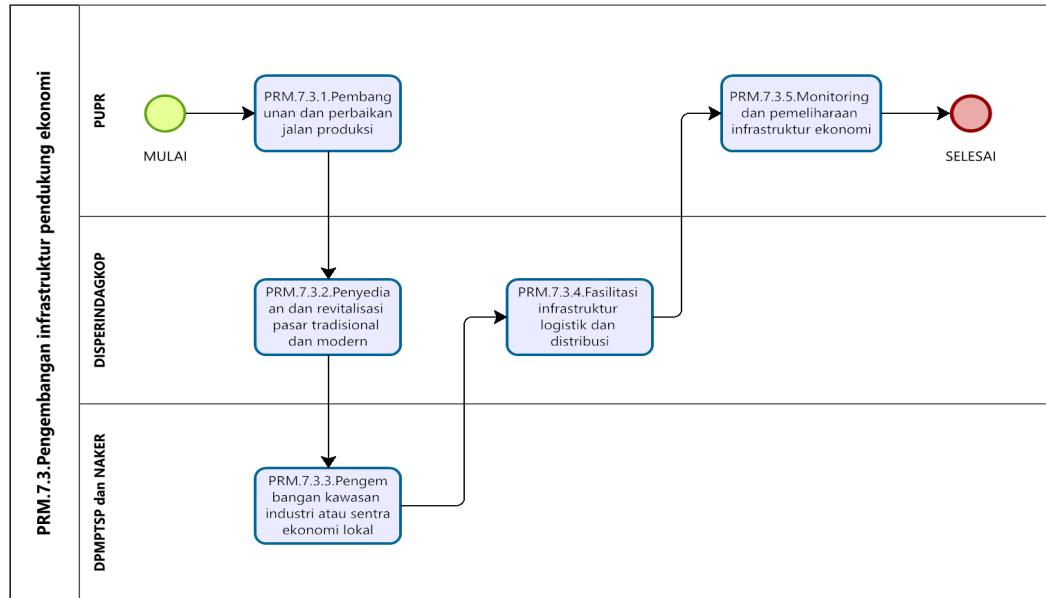


Penyediaan sarana dan prasarana publik yang memadai merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Pariaman. Program ini berlandaskan pada arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Bab IV RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025–2029, khususnya pada misi untuk memperkuat infrastruktur dasar perkotaan dan layanan publik yang inklusif. Melalui pendekatan lintas sektor, program ini diarahkan untuk memastikan setiap warga memiliki akses terhadap fasilitas umum yang aman, nyaman, dan layak fungsi.

Pelaksanaan PRM.7.2 diawali dengan PRM.7.2.1 Penyediaan dan Perbaikan Fasilitas Pendidikan oleh DIKPORA, guna menjamin lingkungan belajar yang representatif di seluruh jenjang pendidikan. Upaya ini kemudian dilanjutkan melalui PRM.7.2.2 Penyediaan Fasilitas Kesehatan Masyarakat oleh Dinas Kesehatan, sebagai langkah nyata dalam memperluas akses layanan kesehatan berkualitas. Selanjutnya, DISKOMINFO berperan dalam PRM.7.2.3 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Publik dan Pemerintahan, yang menitikberatkan pada efisiensi dan digitalisasi layanan.

Untuk menunjang aktivitas sosial dan kebugaran masyarakat, dilakukan PRM.7.2.4 Pengembangan Sarana Olahraga dan Rekreasi sebagai bagian dari peningkatan kualitas ruang publik. Keseluruhan kegiatan ini kemudian diakhiri dengan PRM.7.2.5 Monitoring dan Pemeliharaan Sarana/Prasarana Publik oleh Dinas PUPR, guna memastikan keberlanjutan fungsi dan mutu fasilitas yang telah dibangun.

c. PRM.7.3 Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi (LEVEL 2)



Peningkatan infrastruktur ekonomi menjadi faktor kunci dalam memperkuat daya saing dan memperluas kesempatan usaha masyarakat Kota Pariaman. Program ini selaras dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah sebagaimana termuat dalam Bab IV RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025–2029, yang menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur produktif sebagai penopang pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan PRM.7.3 dimulai dengan PRM.7.3.1 Pembangunan dan Perbaikan Jalan Produksi oleh Dinas PUPR, guna mendukung kelancaran akses distribusi hasil pertanian dan produk lokal. Selanjutnya, DISPERINDAGKOP melaksanakan PRM.7.3.2 Penyediaan dan Revitalisasi Pasar Tradisional dan Modern untuk memperkuat rantai niaga serta memperbaiki ekosistem perdagangan rakyat. Upaya ini diperluas melalui PRM.7.3.3 Pengembangan Kawasan Industri atau Sentra Ekonomi Lokal bekerja sama dengan DPMPTSP dan NAKER, agar kegiatan produksi dan investasi dapat terpusat secara efisien.

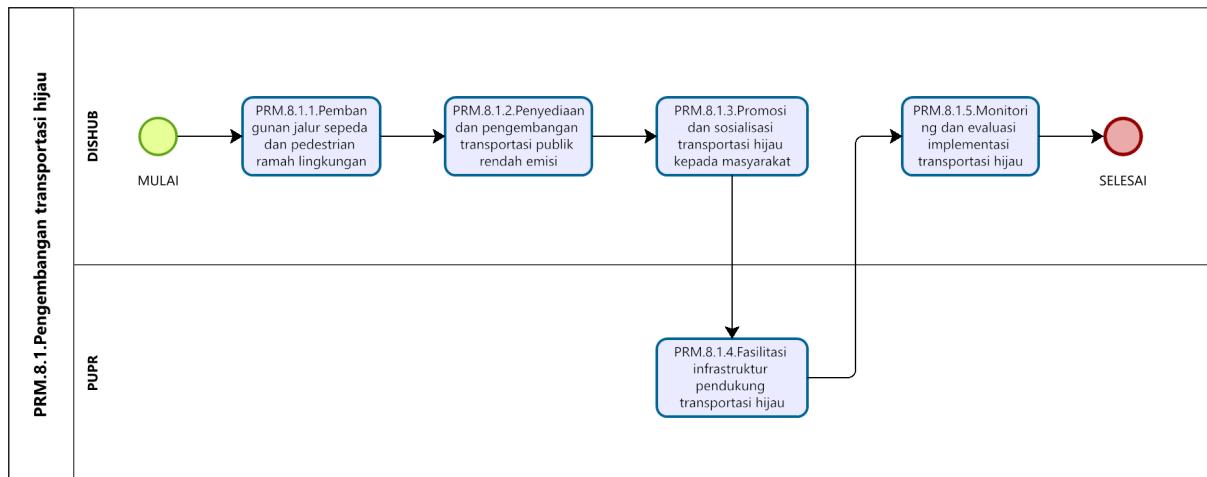
Selain itu, dilakukan PRM.7.3.4 Fasilitasi Infrastruktur Logistik dan Distribusi guna memperlancar arus barang dan jasa antarwilayah. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut diakhiri dengan PRM.7.3.5 Monitoring dan Pemeliharaan Infrastruktur Ekonomi untuk menjamin keberlanjutan fungsi sarana ekonomi yang telah terbangun. Melalui implementasi program ini, diharapkan terbentuk sistem infrastruktur ekonomi yang tangguh, inklusif, serta mampu menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman.

8. Subproses dan Lintas Fungsi, PRM.8. Tersedianya infrastruktur ramah lingkungan dan berkelanjutan (Level 1)

Secara keseluruhan, PRM.8 ini merupakan inti pelayanan pembangunan lingkungan berkelanjutan Kota Pariaman. Prosesnya terintegrasi dengan strategi pengendalian tata ruang, pengelolaan lingkungan hidup, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, sehingga hasil akhirnya adalah terciptanya kota yang ramah lingkungan, sehat, aman dari risiko bencana, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

PRM.8. Tersedianya infrastruktur ramah lingkungan dan berkelanjutan	PRM.8.1. Pengembangan transportasi hijau	PRM.8.2. Pengelolaan air, energi, dan limbah berkelanjutan	PRM.8.3. Pembangunan ruang terbuka hijau & infrastruktur adaptif bencana

a. PRM.8.1 Pengembangan Transportasi Hijau (LEVEL 2)

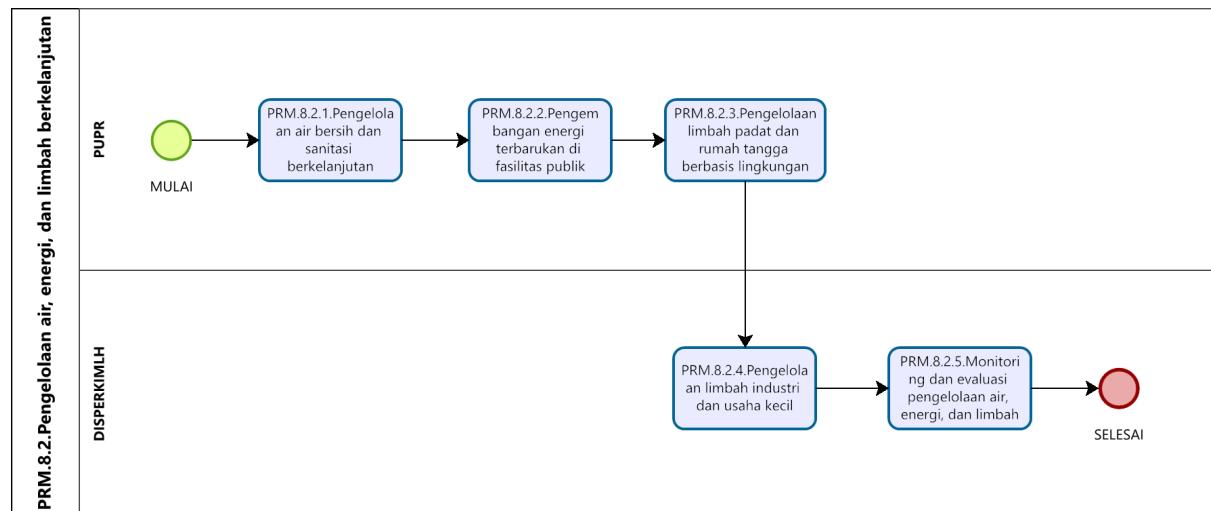


Upaya mewujudkan sistem transportasi yang berkelanjutan menjadi bagian penting dari strategi pembangunan Kota Pariaman menuju kota ramah lingkungan. Program ini berakar pada kebijakan pembangunan hijau yang tercantum dalam Bab IV RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025–2029, khususnya pada misi yang menekankan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata kota yang berkelanjutan. Melalui pendekatan transportasi rendah emisi, pemerintah daerah berkomitmen mengurangi polusi, menghemat energi, serta meningkatkan kualitas udara perkotaan.

Pelaksanaan PRM.8.1 dimulai dengan PRM.8.1.1 Pembangunan Jalur Sepeda dan Pedestrian Ramah Lingkungan oleh Dinas Perhubungan (DISHUB), sebagai sarana transportasi alternatif yang aman dan sehat. Dilanjutkan dengan PRM.8.1.2 Penyediaan dan Pengembangan Transportasi Publik Rendah Emisi, guna mendukung mobilitas perkotaan yang efisien dan ramah lingkungan. Kegiatan berikutnya adalah PRM.8.1.3 Promosi dan Sosialisasi Transportasi Hijau kepada Masyarakat untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap gaya hidup transportasi berkelanjutan.

Agar implementasinya berjalan optimal, dilakukan PRM.8.1.4 Fasilitasi Infrastruktur Pendukung Transportasi Hijau oleh Dinas PUPR, seperti penyediaan stasiun pengisian listrik atau parkir sepeda yang memadai. Seluruh rangkaian kegiatan ini ditutup dengan PRM.8.1.5 Monitoring dan Evaluasi Implementasi Transportasi Hijau sebagai bentuk pengawasan dan penyempurnaan kebijakan transportasi ramah lingkungan di Kota Pariaman.

b. PRM.8.2 Pengelolaan Air, Energi, dan Limbah Berkelanjutan (LEVEL 2)

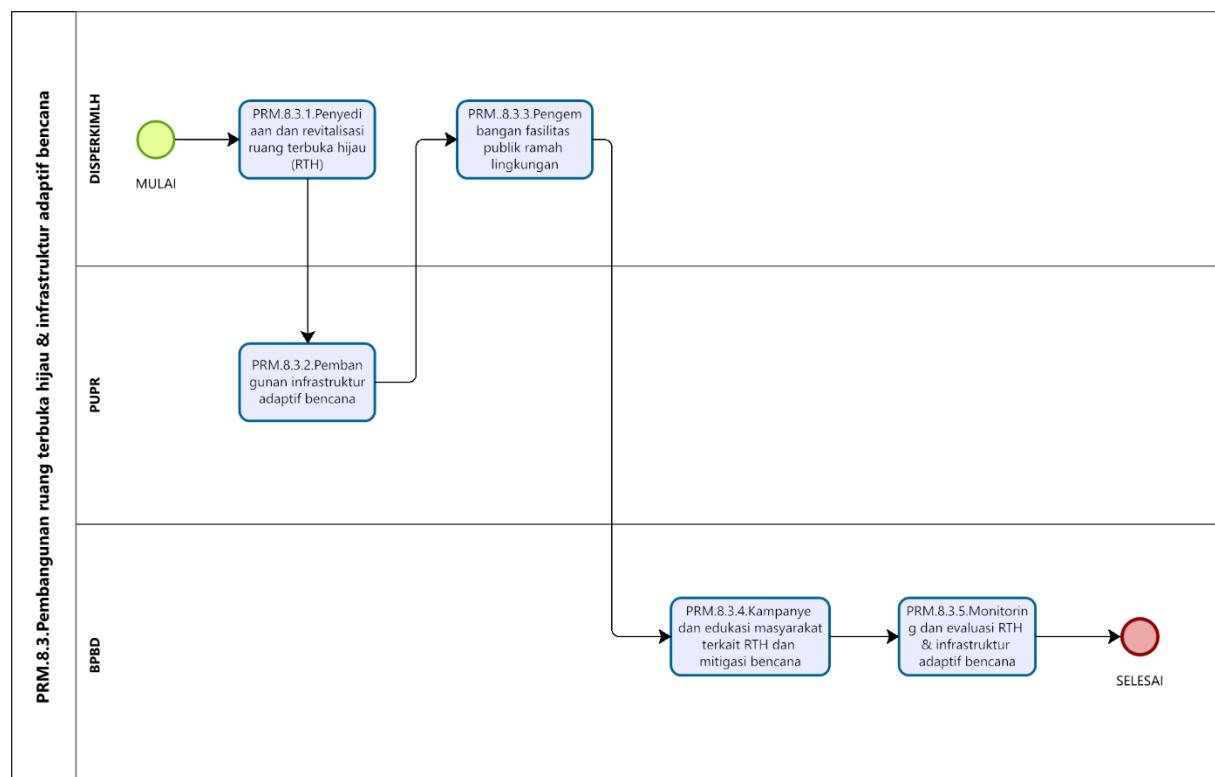


Pengelolaan sumber daya alam yang efisien dan berkelanjutan menjadi prioritas penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup di Kota Pariaman. Program ini sejalan dengan arah kebijakan lingkungan yang tercantum dalam Bab IV RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025–2029, yang menekankan optimalisasi pemanfaatan air, energi, serta pengurangan limbah melalui pendekatan teknologi ramah lingkungan. Inisiatif ini tidak hanya bertujuan menjaga kelestarian ekosistem, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui infrastruktur hijau yang berdaya guna.

Pelaksanaan PRM.8.2 dimulai dengan PRM.8.2.1 Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Berkelanjutan oleh Dinas PUPR, yang berfokus pada peningkatan akses air minum layak dan sistem sanitasi sehat. Kegiatan dilanjutkan dengan PRM.8.2.2 Pengembangan Energi Terbarukan di Fasilitas Publik, untuk mendukung efisiensi energi dan menekan emisi karbon. Dalam ranah pengelolaan limbah, DISPERKIMLH berperan melalui PRM.8.2.3 Pengelolaan Limbah Padat dan Rumah Tangga Berbasis Lingkungan serta PRM.8.2.4 Pengelolaan Limbah Industri dan Usaha Kecil, guna mendorong penerapan prinsip ekonomi sirkular di tingkat masyarakat dan pelaku usaha.

Keseluruhan kegiatan tersebut diakhiri dengan PRM.8.2.5 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Air, Energi, dan Limbah, yang memastikan efektivitas program serta menjaga keberlanjutan hasilnya. Melalui implementasi program ini, Kota Pariaman diharapkan mampu menjadi kota yang tangguh lingkungan, efisien energi, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

c. PRM.8.3 Pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan Infrastruktur Adaptif Bencana (LEVEL 2)

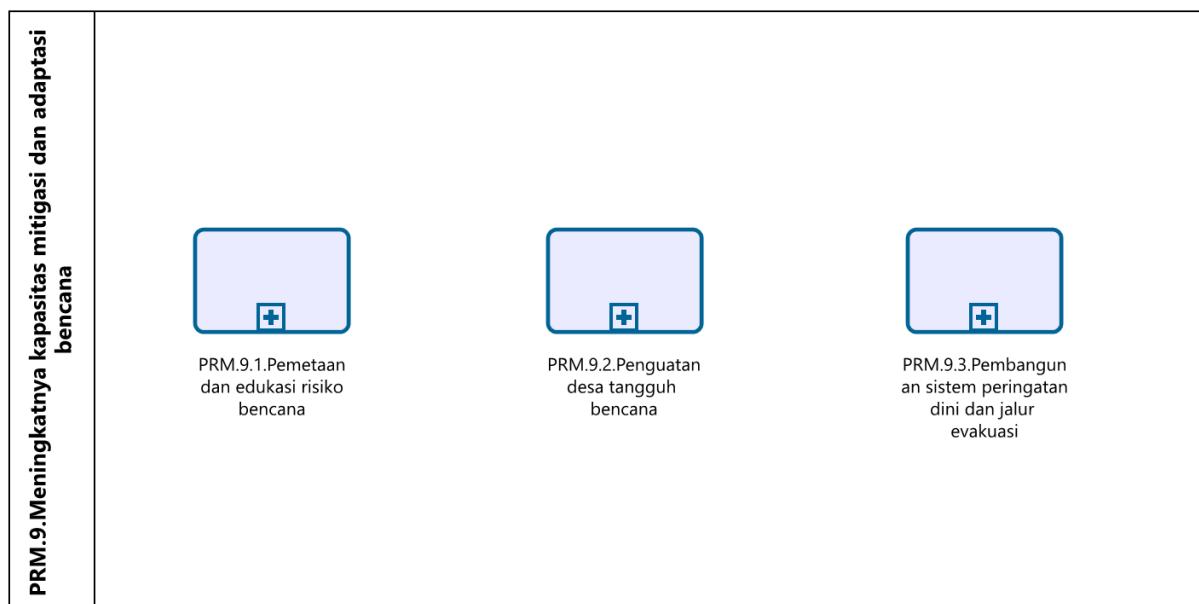


Upaya penguatan ketahanan lingkungan dan mitigasi bencana menjadi bagian integral dalam arah pembangunan Kota Pariaman. Program ini berpijakan pada kebijakan pembangunan berkelanjutan yang diuraikan dalam Bab IV RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025–2029, dengan fokus pada peningkatan kualitas ruang publik dan infrastruktur adaptif terhadap perubahan iklim. Melalui pendekatan ekologis, Pemerintah Kota Pariaman berkomitmen menciptakan lingkungan kota yang lebih resilien, nyaman, dan aman bagi masyarakat.

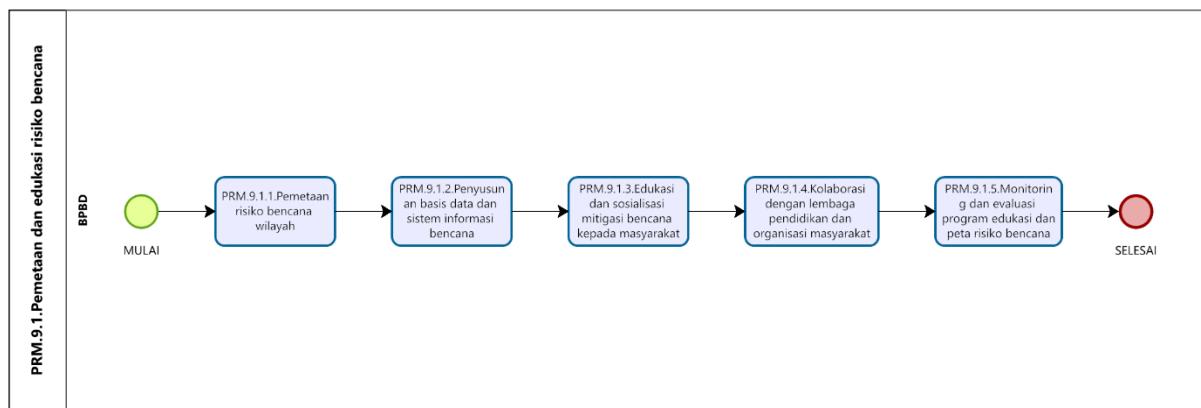
Pelaksanaan PRM.8.3 dimulai dengan PRM.8.3.1 Penyediaan dan Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) oleh DISPERKIMLH, yang bertujuan memperluas ruang publik hijau sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan. Dilanjutkan dengan PRM.8.3.2 Pembangunan Infrastruktur Adaptif Bencana oleh Dinas PUPR untuk memperkuat sistem perlindungan wilayah dari risiko bencana. Selain itu, dilakukan PRM.8.3.3 Pengembangan Fasilitas Publik Ramah Lingkungan serta PRM.8.3.4 Kampanye dan Edukasi Masyarakat terkait RTH dan Mitigasi Bencana guna menumbuhkan kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan. Keseluruhan proses diakhiri dengan PRM.8.3.5 Monitoring dan Evaluasi RTH & Infrastruktur Adaptif Bencana untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program yang dilaksanakan.

9. Subproses dan Lintas Fungsi, PRM.9. Meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana (Level 1)

Peta proses bisnis PRM.9: Meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana dalam RPJMD Kota Pariaman 2025–2029 menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk membangun ketangguhan kota terhadap risiko bencana alam maupun non-alam. Melalui tiga fokus utama pemetaan dan edukasi risiko bencana, penguatan desa tangguh bencana, serta pembangunan sistem peringatan dini dan jalur evakuasi RPJMD mengarahkan strategi mitigasi yang proaktif dan adaptasi yang berkelanjutan. Hal ini menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan Pariaman sebagai kota pesisir yang aman, tangguh, dan berdaya saing, sekaligus mendukung misi pembangunan berkelanjutan yang responsif terhadap perubahan iklim dan potensi bencana.



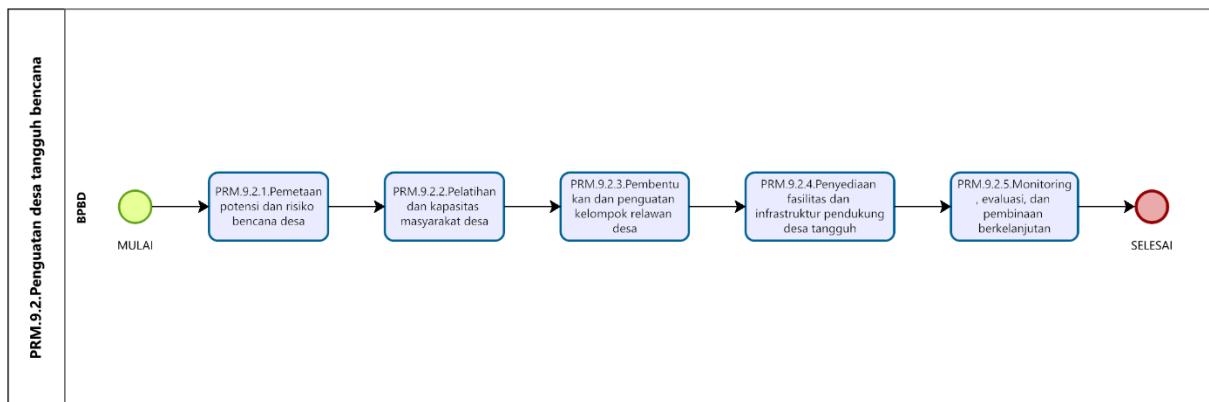
a. PRM.9.1 Pemetaan dan Edukasi Risiko Bencana (LEVEL 2)



Dalam upaya membangun kota yang tangguh terhadap ancaman bencana, Pemerintah Kota Pariaman menempatkan pemetaan risiko dan edukasi kebencanaan sebagai prioritas strategis. Program ini berlandaskan arah kebijakan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam Bab IV RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025–2029, yang menitikberatkan pada penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Pendekatan berbasis data dan partisipasi publik menjadi dasar pelaksanaannya, guna mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang cepat, akurat, dan adaptif.

Pelaksanaan PRM.9.1 dimulai dengan PRM.9.1.1 Pemetaan Risiko Bencana Wilayah oleh BPBD, untuk mengidentifikasi potensi bahaya di seluruh kecamatan. Hasil pemetaan ini dikembangkan lebih lanjut melalui PRM.9.1.2 Penyusunan Basis Data dan Sistem Informasi Bencana, yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya dilakukan PRM.9.1.3 Edukasi dan Sosialisasi Mitigasi Bencana kepada Masyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran dan kemampuan tanggap terhadap risiko. Program ini juga mencakup PRM.9.1.4 Kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan dan Organisasi Masyarakat, sebagai wujud sinergi lintas sektor dalam memperkuat kesiapsiagaan publik. Seluruh rangkaian kegiatan kemudian diakhiri dengan PRM.9.1.5 Monitoring dan Evaluasi Program Edukasi dan Peta Risiko Bencana**, yang bertujuan memastikan keberlanjutan dan efektivitas program. Melalui pelaksanaan kegiatan ini, Kota Pariaman diharapkan semakin siap menghadapi potensi bencana dengan sistem mitigasi yang terarah dan masyarakat yang tangguh terhadap risiko.

b. PRM.9.2 Penguatan Desa Tangguh Bencana (LEVEL 2)

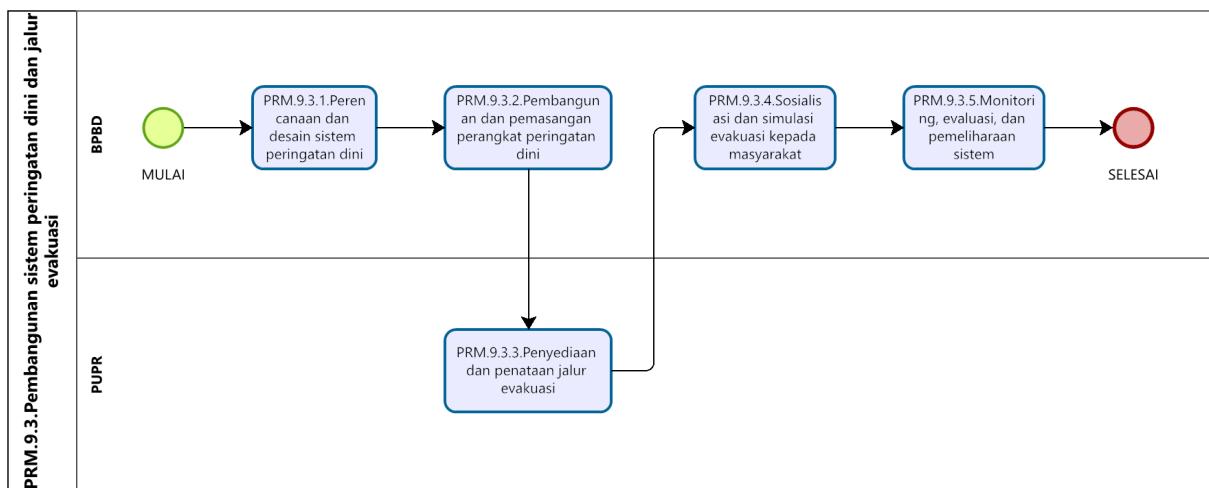


Pembangunan desa tangguh bencana merupakan salah satu strategi penting dalam memperkuat ketahanan daerah terhadap berbagai ancaman alam dan non-alam. Program ini selaras dengan arah kebijakan penanggulangan bencana sebagaimana diuraikan dalam Bab IV RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025–2029, yang menitikberatkan pada peningkatan kesiapsiagaan dan kapasitas masyarakat di tingkat akar rumput. Melalui pendekatan berbasis komunitas, Pemerintah Kota Pariaman berupaya mendorong kemandirian desa dalam mengenali potensi bahaya, mengelola risiko, serta memulihkan diri pascabencana.

Pelaksanaan PRM.9.2 diawali dengan PRM.9.2.1 Pemetaan Potensi dan Risiko Bencana Desa oleh BPBD, untuk mengidentifikasi karakteristik ancaman dan kapasitas lokal yang dimiliki masing-masing desa. Selanjutnya, dilakukan PRM.9.2.2 Pelatihan dan Penguatan Kapasitas Masyarakat Desa, guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi bencana. Program dilanjutkan melalui PRM.9.2.3 Pembentukan dan Penguatan Kelompok Relawan Desa, yang menjadi garda terdepan dalam upaya mitigasi dan evakuasi di wilayahnya masing-masing.

Untuk mendukung ketangguhan struktural, PRM.9.2.4 Penyediaan Fasilitas dan Infrastruktur Pendukung Desa Tangguh dilakukan agar kesiapsiagaan dapat berjalan optimal dengan dukungan sarana yang memadai. Tahapan akhir, yaitu PRM.9.2.5 Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Berkelanjutan, difokuskan pada pengawasan dan peningkatan berkelanjutan terhadap kinerja desa tangguh. Melalui rangkaian kegiatan ini, diharapkan setiap desa di Kota Pariaman mampu menjadi komunitas yang mandiri, adaptif, dan siap siaga dalam menghadapi berbagai potensi bencana.

c. PRM.9.3 Pembangunan Sistem Peringatan Dini dan Jalur Evakuasi (LEVEL 2)



Pembangunan sistem peringatan dini dan jalur evakuasi menjadi langkah strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan bencana di Kota Pariaman. Program ini berpedoman pada kebijakan mitigasi bencana yang tercantum dalam Bab IV RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025–2029, yang menekankan peningkatan infrastruktur kebencanaan berbasis teknologi serta partisipasi masyarakat. Melalui penerapan sistem yang terintegrasi, pemerintah berupaya meminimalkan risiko korban dan kerugian melalui deteksi dini serta jalur evakuasi yang tertata dengan baik.

Pelaksanaan PRM.9.3 dimulai dengan PRM.9.3.1 Perencanaan dan Desain Sistem Peringatan Dini oleh BPBD, untuk merancang sistem yang sesuai dengan karakteristik wilayah rawan bencana. Dilanjutkan dengan PRM.9.3.2 Pembangunan dan Pemasangan Perangkat Peringatan Dini, sebagai bentuk implementasi dari desain yang telah disusun. Bersamaan dengan itu, Dinas PUPR melaksanakan PRM.9.3.3 Penyediaan dan Penataan Jalur Evakuasi agar masyarakat memiliki rute penyelamatan yang aman dan mudah diakses.

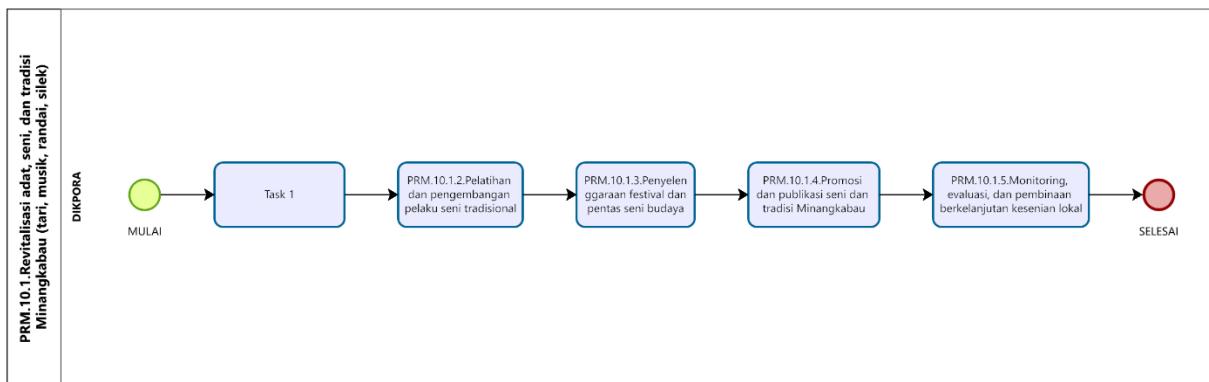
Setelah sistem dan jalur siap digunakan, dilakukan PRM.9.3.4 Sosialisasi dan Simulasi Evakuasi kepada Masyarakat, guna meningkatkan kesiapsiagaan dan pemahaman publik dalam menghadapi situasi darurat. Tahap akhir, PRM.9.3.5 Monitoring, Evaluasi, dan Pemeliharaan Sistem, dilaksanakan untuk memastikan keandalan peralatan dan efektivitas jalur evakuasi secara berkelanjutan. Dengan implementasi program ini, Kota Pariaman diharapkan mampu memiliki sistem peringatan dan evakuasi yang tangguh, responsif, serta berpihak pada keselamatan masyarakat.

10. Subproses dan Lintas Fungsi, PRM.10. Pelestarian dan Penguatan Budaya Lokal berbasis ABS-SBK (Level 1)

Peta proses bisnis PRM.10: Pelestarian dan Penguatan Budaya Lokal berbasis ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dalam RPJMD Kota Pariaman 2025–2029 menekankan pentingnya pelestarian nilai-nilai adat, seni, dan tradisi Minangkabau sebagai identitas daerah. Melalui revitalisasi seni budaya lokal, penguatan peran lembaga adat dan ninik mamak, serta edukasi nilai ABS-SBK di sekolah dan masyarakat, proses ini diarahkan untuk memperkokoh karakter masyarakat yang berakar pada kearifan lokal namun tetap adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, RPJMD Kota Pariaman tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga menegaskan bahwa pelestarian budaya merupakan pilar strategis dalam mewujudkan kota yang berjati diri, berdaya saing, dan berkelanjutan.

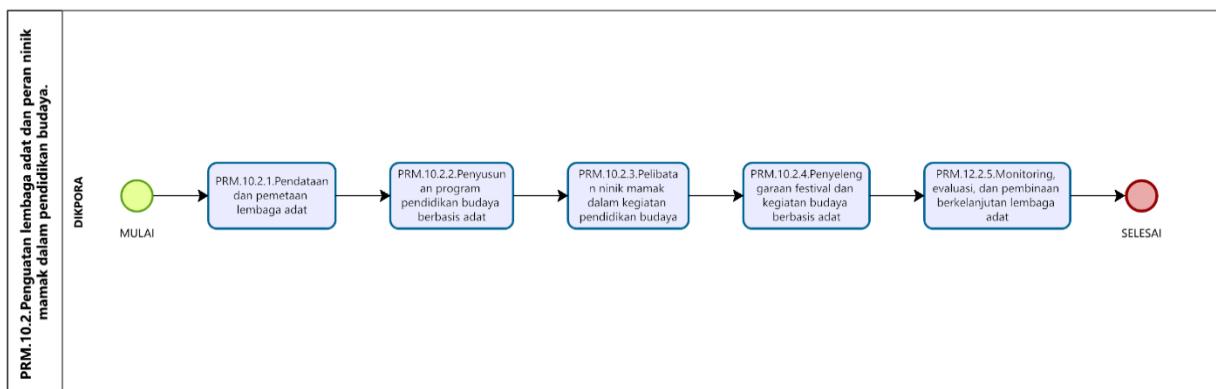
<p>PRM.10. Pelestarian dan Penguatan Budaya Lokal berbasis ABS-SBK</p>			
	<p>PRM.10.1.Revitalisasi adat, seni, dan tradisi Minangkabau (tari, musik, randai, silek).</p>	<p>PRM.10.2.Penguatan lembaga adat dan peran ninik mamak dalam pendidikan budaya.</p>	<p>PRM.10.3.Edukasi nilai ABS-SBK di sekolah dan masyarakat.</p>

a. PRM.10.1 Revitalisasi Adat, Seni, dan Tradisi Minangkabau (seni musik, randai, silek) (LEVEL 2)



Pelestarian nilai-nilai budaya Minangkabau merupakan langkah strategis dalam memperkuat identitas daerah serta menjaga warisan budaya masyarakat Pariaman. Program ini berlandaskan pada arah kebijakan pembangunan sosial dan budaya sebagaimana tercantum dalam Bab IV RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025–2029, yang menekankan pentingnya pelestarian seni dan tradisi lokal sebagai bagian dari pembentukan karakter masyarakat. Melalui kegiatan revitalisasi ini, Pemerintah Kota Pariaman berupaya menghidupkan kembali tradisi seni Minangkabau seperti musik tradisional, randai, dan silek agar tetap berkembang di tengah modernisasi. Pelaksanaan PRM.10.1 dimulai oleh DIKPORA dengan PRM.10.1.2 Pelatihan dan Pengembangan Pelaku Seni Tradisional, untuk meningkatkan kapasitas dan kreativitas seniman lokal. Kegiatan dilanjutkan dengan PRM.10.1.3 Penyelenggaraan Festival dan Pentas Seni Budaya, sebagai wadah ekspresi dan apresiasi terhadap karya seni tradisional. Selanjutnya, melalui PRM.10.1.4 Promosi dan Publikasi Seni serta Tradisi Minangkabau, dilakukan penyebarluasan nilai budaya kepada masyarakat luas, termasuk generasi muda. Proses ini kemudian ditutup dengan PRM.10.1.5 Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Berkelanjutan Kesenian Lokal, guna memastikan keberlangsungan dan pengembangan seni tradisional secara konsisten.

b. PRM.10.2 Penguatan Lembaga Adat dan Peran Ninik Mamak dalam Pendidikan Budaya (LEVEL 2)

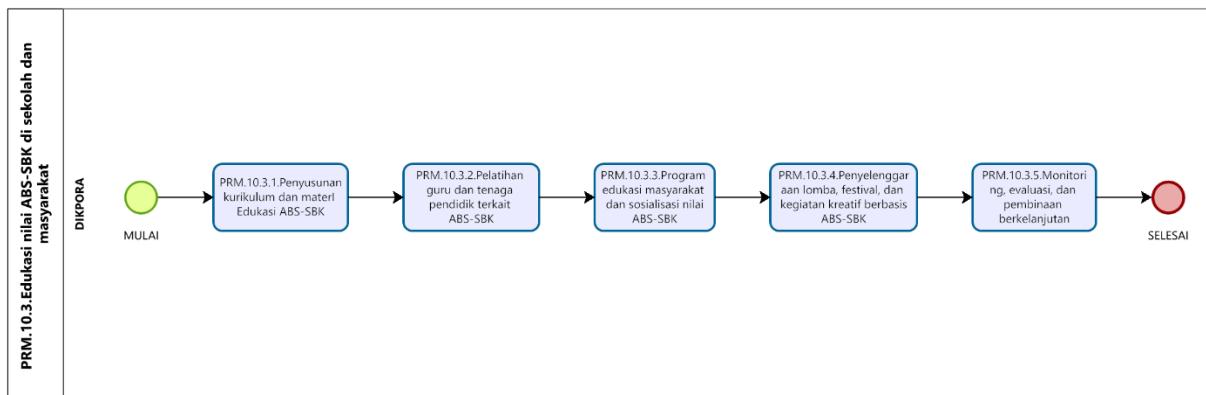


Peran lembaga adat dan ninik mamak memiliki arti penting dalam menjaga kesinambungan nilai-nilai budaya serta membentuk karakter masyarakat Kota Pariaman. Program ini merupakan bagian dari arah kebijakan pembangunan sosial budaya sebagaimana tertuang dalam Bab IV RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025–2029, yang menekankan pentingnya pelestarian dan pemberdayaan lembaga adat sebagai pilar pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Melalui penguatan fungsi adat, pemerintah berupaya menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pelaksanaan PRM.10.2 dilaksanakan oleh DIKPORA dengan langkah awal PRM.10.2.1 Pendataan dan Pemetaan Lembaga Adat, untuk memperoleh gambaran kondisi aktual kelembagaan adat di tiap nagari atau desa. Selanjutnya, dilakukan PRM.10.2.2 Penyusunan Program Pendidikan Budaya Berbasis Adat, yang memadukan nilai adat ke dalam kegiatan pendidikan formal maupun nonformal. Tahapan berikutnya adalah PRM.10.2.3 Pelibatan Ninik Mamak dalam Kegiatan Pendidikan Budaya, guna memperkuat transfer nilai-nilai luhur melalui keteladanan dan pembinaan masyarakat.

Selain itu, PRM.10.2.4 Penyelenggaraan Festival dan Kegiatan Budaya Berbasis Adat dilaksanakan sebagai wadah apresiasi sekaligus mempererat hubungan antar komunitas adat. Proses ini diakhiri dengan PRM.10.2.5 Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Berkelanjutan Lembaga Adat, yang bertujuan memastikan kelembagaan adat tetap aktif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Melalui program ini, Kota Pariaman diharapkan mampu mempertahankan kekuatan sosial budaya masyarakatnya yang berakar pada nilai-nilai adat dan kearifan lokal.

c. PRM.10.3 Edukasi Nilai ABS–SBK di Sekolah dan Masyarakat (LEVEL 2)



Penanaman nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS–SBK) menjadi pondasi utama dalam membangun karakter masyarakat Kota Pariaman yang berakhlik, berbudaya, dan berdaya saing. Program ini selaras dengan arah kebijakan pendidikan karakter dan kebudayaan yang dijabarkan dalam Bab IV RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025–2029, yang berfokus pada penguatan nilai-nilai religius dan kearifan lokal dalam sistem pendidikan formal maupun nonformal. Melalui program ini, pemerintah berupaya menumbuhkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berintegritas dan berkepribadian sesuai falsafah Minangkabau.

Pelaksanaan PRM.10.3 diawali dengan PRM.10.3.1 Penyusunan Kurikulum dan Materi Edukasi ABS–SBK oleh DIKPORA, yang menjadi dasar penerapan nilai-nilai budaya dan agama di sekolah. Tahapan berikutnya adalah PRM.10.3.2 Pelatihan Guru dan Tenaga Pendidik Terkait ABS–SBK, guna memastikan proses pembelajaran berjalan efektif dan kontekstual. Selanjutnya, melalui PRM.10.3.3 Program Edukasi Masyarakat dan Sosialisasi Nilai ABS–SBK, pemerintah melibatkan peran masyarakat luas untuk memperkuat penerapan nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari.

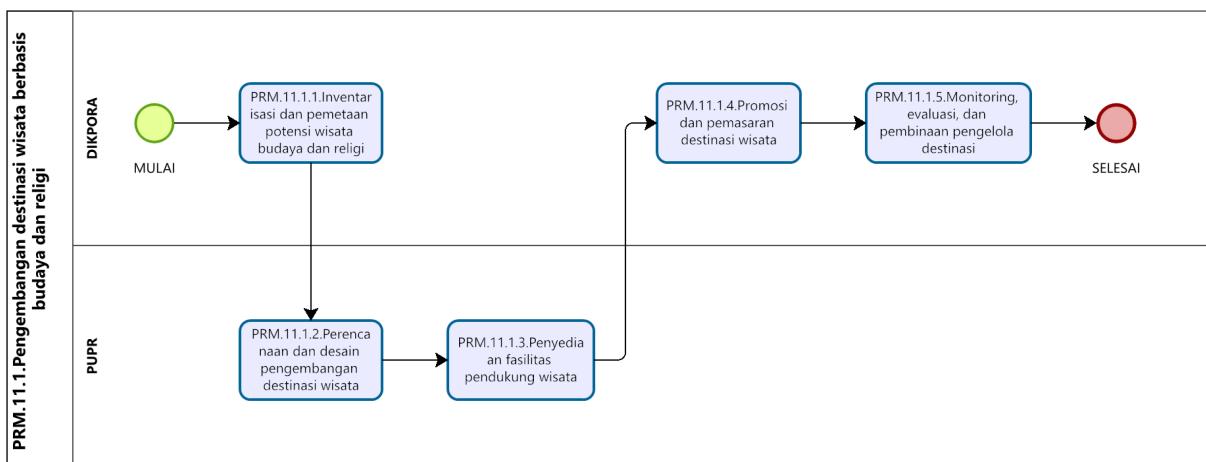
Untuk menumbuhkan semangat partisipatif, dilakukan PRM.10.3.4 Penyelenggaraan Lomba, Festival, dan Kegiatan Kreatif Berbasis ABS–SBK, yang menjadi media pembelajaran sekaligus apresiasi terhadap nilai-nilai luhur budaya lokal. Rangkaian kegiatan ini diakhiri dengan PRM.10.3.5 Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Berkelanjutan, sebagai bentuk pengawasan terhadap efektivitas implementasi nilai ABS–SBK. Melalui pelaksanaan program ini, Kota Pariaman diharapkan mampu melahirkan masyarakat yang berkarakter kuat, religius, dan menjunjung tinggi falsafah budaya Minangkabau.

11. Subproses dan Lintas Fungsi, PRM.11 Pelestarian dan Penguatan Budaya Lokal berbasis ABS-SBK (Level 1)

Peta proses bisnis PRM.11: Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya, Religi, dan Ekonomi Kreatif dalam RPJMD Kota Pariaman 2025–2029 menegaskan arah kebijakan daerah untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi lokal sekaligus media pelestarian budaya dan penguatan identitas religius. Melalui pengembangan destinasi wisata berbasis budaya dan religi, pemberdayaan UMKM kuliner serta ekonomi kreatif, dan promosi pariwisata berkelanjutan lewat festival budaya dan event daerah, RPJMD mendorong terciptanya ekosistem pariwisata yang inklusif, produktif, dan berdaya saing. Hal ini menjadi strategi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan mengangkat citra Pariaman sebagai kota wisata unggulan yang berlandaskan nilai budaya dan kearifan lokal.

<p>PRM.11. Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya, Religi, dan Ekonomi Kreatif</p>	 PRM.11.1.Pengembangan destinasi wisata berbasis budaya dan religi (pantai, desa wisata, masjid bers	 PRM.11.2.Pemberdayaan UMKM, kuliner, dan ekonomi kreatif berbasis pariwisata.	 PRM.11.3.Promosi pariwisata berkelanjutan melalui festival budaya dan event daerah.
--	---	--	---

a. PRM.11.1 Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Budaya dan Religi (LEVEL 2)



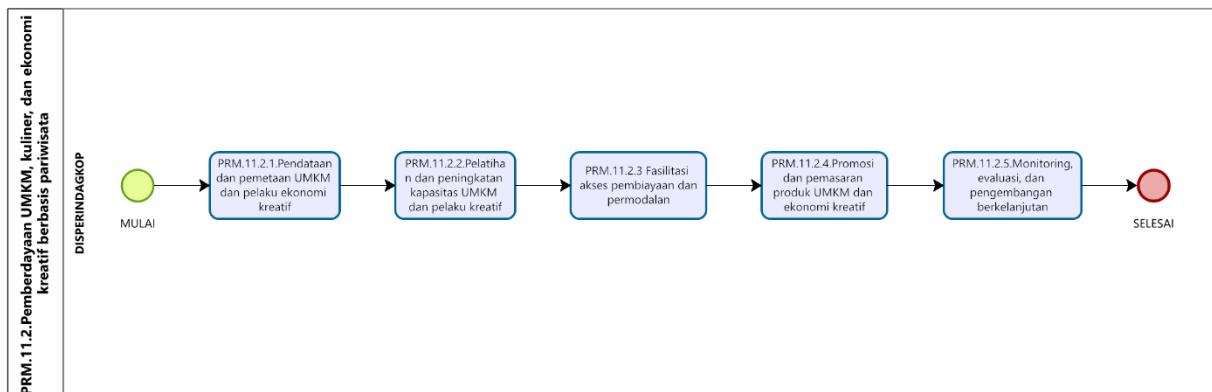
Pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu fokus utama dalam peningkatan ekonomi daerah sekaligus pelestarian budaya dan nilai-nilai keagamaan. Melalui program PRM.11.1 Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Budaya dan Religi, Pemerintah Kota Pariaman berupaya menciptakan destinasi wisata yang tidak hanya menarik dari segi keindahan alam, tetapi juga mengandung nilai historis, budaya, dan spiritual yang memperkuat identitas daerah. Program ini selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang menitikberatkan pada sektor pariwisata berkelanjutan dan berkarakter lokal.

Pelaksanaan program dimulai dengan PRM.11.1.1 Inventarisasi dan Pemetaan Potensi Wisata Budaya dan Religi, yang dilakukan oleh DIKPORA untuk mengidentifikasi kekayaan wisata budaya dan religi yang potensial dikembangkan. Selanjutnya, hasil pemetaan menjadi dasar bagi PRM.11.1.2 Perencanaan dan Desain Pengembangan Destinasi Wisata yang dilaksanakan oleh PUPR, guna memastikan pembangunan destinasi selaras dengan prinsip tata ruang dan kelestarian lingkungan.

Tahapan berikutnya, PRM.11.1.3 Penyediaan Fasilitas Pendukung Wisata, bertujuan meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi wisatawan melalui pembangunan sarana dan prasarana pendukung. Setelah infrastruktur siap, dilakukan PRM.11.1.4 Promosi dan Pemasaran Destinasi Wisata oleh DIKPORA, untuk memperluas jangkauan wisatawan dan memperkenalkan potensi wisata budaya dan religi Kota Pariaman di tingkat regional maupun nasional.

Kegiatan ditutup dengan PRM.11.1.5 Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Pengelola Destinasi, yang berfungsi untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas pengelolaan destinasi wisata.

b. PRM.11.2 Pemberdayaan UMKM, Kuliner, dan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata (LEVEL 2)



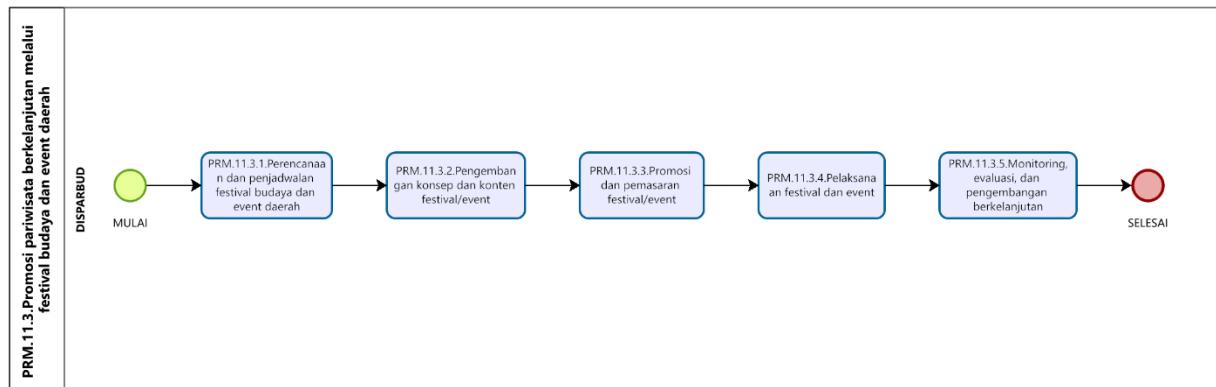
Program PRM.11.2 Pemberdayaan UMKM, Kuliner, dan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (DISPERINDAGKOP) sebagai upaya memperkuat sektor ekonomi lokal yang mendukung pengembangan pariwisata di Kota Pariaman. Program ini berfokus pada peningkatan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta industri kreatif agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar wisata yang terus berkembang.

Tahapan kegiatan dimulai dengan PRM.11.2.1 Pendataan dan Pemetaan UMKM dan Pelaku Ekonomi Kreatif, yang bertujuan mengidentifikasi potensi, permasalahan, dan kebutuhan pengembangan usaha di sektor pariwisata. Data ini menjadi dasar bagi pelaksanaan PRM.11.2.2 Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas UMKM dan Pelaku Kreatif, melalui kegiatan peningkatan keterampilan manajerial, digitalisasi usaha, serta inovasi produk berbasis budaya lokal.

Selanjutnya, pada tahap PRM.11.2.3 Fasilitasi Akses Pembiayaan dan Permodalan, pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk kemudahan akses ke lembaga keuangan, bantuan modal, serta program kemitraan yang berorientasi pada pengembangan ekonomi kreatif. Tahap berikutnya yaitu PRM.11.2.4 Promosi dan Pemasaran Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif, yang berfokus pada memperluas jaringan pasar melalui kegiatan promosi, pameran, dan kolaborasi dengan sektor pariwisata.

Program diakhiri dengan PRM.11.2.5 Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Berkelanjutan, untuk memastikan efektivitas program dan keberlanjutan pertumbuhan UMKM di kawasan wisata. Melalui pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan tercipta sinergi antara sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat serta memperkuat ekonomi daerah berbasis potensi lokal.

c. PRM.11.3 Promosi Pariwisata Berkelanjutan Melalui Festival Budaya dan Event Daerah (LEVEL 2)



Program PRM.11.3 Promosi Pariwisata Berkelanjutan Melalui Festival Budaya dan Event Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) sebagai upaya strategis dalam memperkuat citra pariwisata daerah melalui kegiatan berbasis budaya lokal. Program ini berfokus pada pengembangan event dan festival yang tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

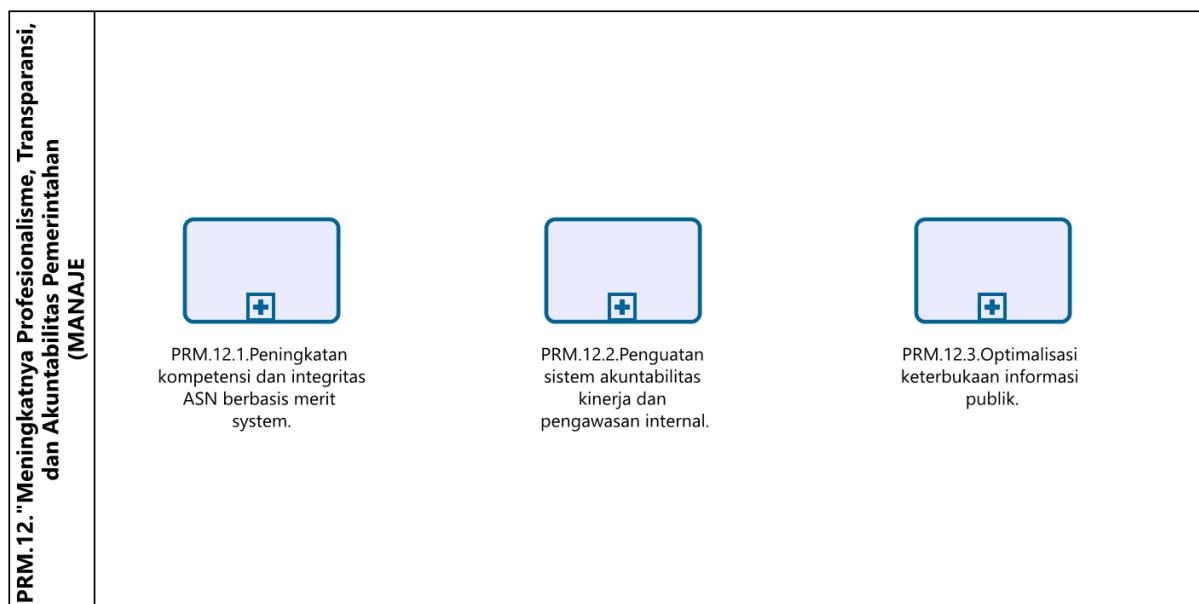
Pelaksanaan kegiatan diawali dengan PRM.11.3.1 Perencanaan dan Penjadwalan Festival Budaya dan Event Daerah, yang mencakup penyusunan kalender kegiatan tahunan serta identifikasi potensi budaya yang dapat diangkat menjadi daya tarik wisata. Tahap selanjutnya, PRM.11.3.2 Pengembangan Konsep dan Konten Festival/Event, dilakukan dengan menyesuaikan tema kegiatan terhadap kearifan lokal, sejarah, dan tradisi masyarakat, sehingga setiap event memiliki identitas khas daerah.

Kemudian dilanjutkan dengan PRM.11.3.3 Promosi dan Pemasaran Festival/Event, yang dilakukan melalui media digital, jejaring wisata, dan kolaborasi dengan pelaku industri pariwisata untuk meningkatkan jangkauan publikasi. Pada tahap PRM.11.3.4 Pelaksanaan Festival dan Event, kegiatan diselenggarakan secara kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, pelaku seni, dan pelaku usaha pariwisata untuk menciptakan suasana yang menarik dan berdaya tarik tinggi bagi wisatawan.

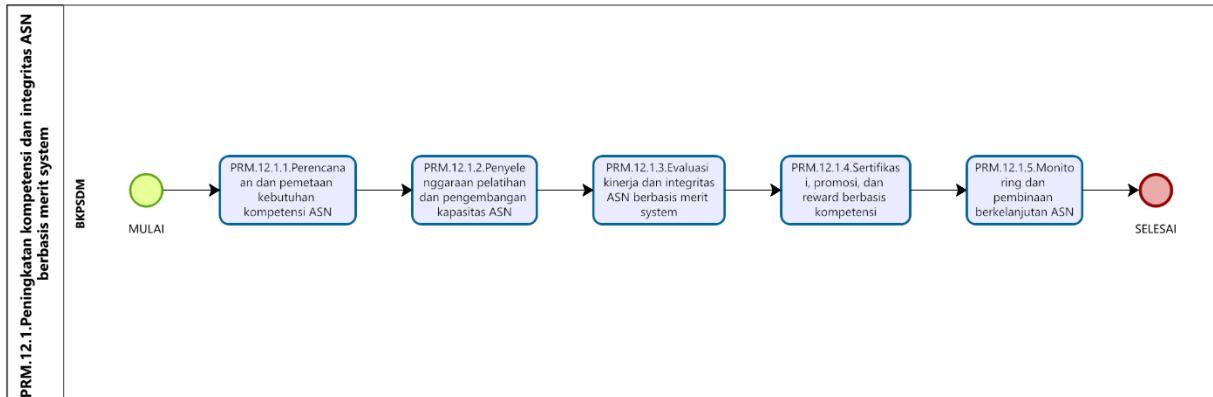
Sebagai tahap akhir, PRM.11.3.5 Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Berkelanjutan dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan, dampak ekonomi, serta penguatan nilai-nilai budaya dalam penyelenggaraan event. Melalui program ini, diharapkan promosi pariwisata Kota Pariaman dapat berjalan lebih efektif, berkesinambungan, dan memberikan manfaat ekonomi sekaligus pelestarian budaya bagi masyarakat setempat.

12. Subproses dan Lintas Fungsi, PRM.12 Meningkatnya Profesionalisme, Transparansi, dan Akuntabilitas Pemerintahan (Level 1)

Peta proses bisnis PRM.12: Meningkatnya Profesionalisme, Transparansi, dan Akuntabilitas Pemerintahan dalam RPJMD Kota Pariaman 2025–2029 menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani. Fokusnya mencakup peningkatan kompetensi serta integritas ASN berbasis sistem merit, penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal, serta optimalisasi keterbukaan informasi publik. Melalui proses ini, RPJMD mengarahkan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin transparan, akuntabel, dan profesional, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara lebih efisien dan berkelanjutan.



a. PRM.12.1 Peningkatan Kompetensi dan Integritas ASN Berbasis Merit System (LEVEL 2)

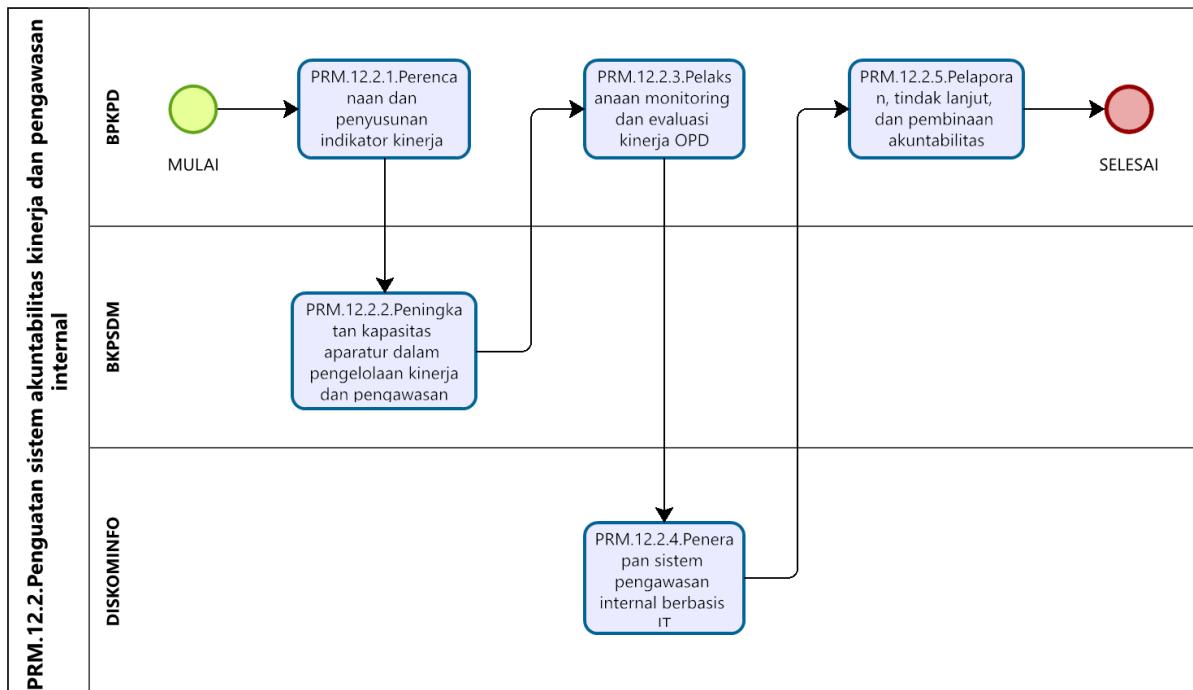


Program PRM.12.1 Peningkatan Kompetensi dan Integritas ASN Berbasis Merit System merupakan bagian dari pelaksanaan Bab V RPJMD Kota Pariaman, yang mendukung Misi ke-5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Program ini bertujuan meningkatkan profesionalisme, integritas, serta kinerja aparatur sipil negara (ASN) melalui penerapan sistem merit yang berkeadilan dan berbasis kompetensi, guna menciptakan birokrasi yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan pelayanan publik.

Rangkaian kegiatan program ini dimulai dengan PRM.12.1.1 Perencanaan dan Pemetaan Kebutuhan Kompetensi ASN yang dilaksanakan oleh BKPSDM sebagai dasar penyusunan strategi pengembangan sumber daya aparatur. Selanjutnya dilakukan PRM.12.1.2 Penyelenggaraan Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas ASN, untuk meningkatkan kemampuan teknis, manajerial, dan sosial kultural aparatur. Proses dilanjutkan dengan PRM.12.1.3 Evaluasi Kinerja dan Integritas ASN Berbasis Merit System, sebagai upaya memastikan penerapan sistem penilaian yang objektif dan terukur sesuai kinerja.

Tahap berikutnya mencakup PRM.12.1.4 Sertifikasi, Promosi, dan Reward Berbasis Kompetensi, yang ditujukan untuk memberi penghargaan dan jenjang karier berdasarkan prestasi kerja. Program ini diakhiri dengan PRM.12.1.5 Monitoring dan Pembinaan Berkelanjutan ASN, untuk memastikan keberlanjutan peningkatan kualitas aparatur. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan tercipta ASN yang berintegritas, profesional, dan mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai arah pembangunan dalam RPJMD Kota Pariaman.

b. PRM.12.2 Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan Internal (LEVEL 2)



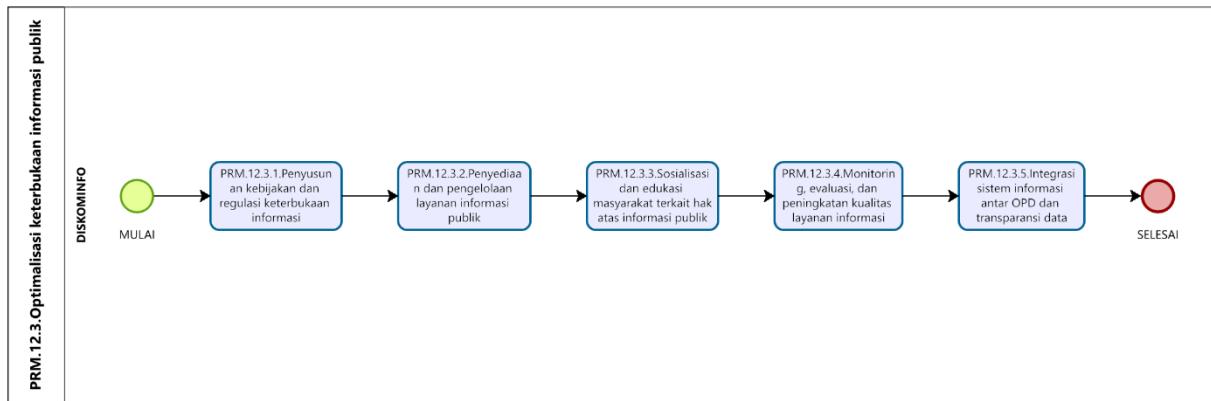
Program PRM.12.2 Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan Internal merupakan implementasi dari Bab V RPJMD Kota Pariaman, yang mendukung Misi ke-5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Program ini bertujuan untuk memperkuat sistem akuntabilitas kinerja serta meningkatkan efektivitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman melalui pendekatan yang terintegrasi, transparan, dan berbasis teknologi informasi.

Tahapan pelaksanaan program dimulai dengan PRM.12.2.1 Perencanaan dan Penyusunan Indikator Kinerja oleh BKPD sebagai dasar evaluasi kinerja OPD. Dilanjutkan dengan PRM.12.2.2 Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Kinerja dan Pengawasan oleh BKPSDM, guna membekali aparatur dengan kemampuan manajerial dan pengawasan yang memadai. Proses berikutnya adalah PRM.12.2.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja OPD, untuk menilai efektivitas capaian kinerja dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan berkelanjutan.

Selanjutnya, DISKOMINFO berperan dalam PRM.12.2.4 Penerapan Sistem Pengawasan Internal Berbasis IT, yang memperkuat transparansi dan efisiensi dalam pengawasan internal. Program ini ditutup dengan PRM.12.2.5 Pelaporan,

Tindak Lanjut, dan Pembinaan Akuntabilitas, sebagai langkah pemberian dan peningkatan mutu pelaksanaan akuntabilitas kinerja di seluruh perangkat daerah.

c. **PRM.12.3 Penguatan Sistem Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah (LEVEL**



2)

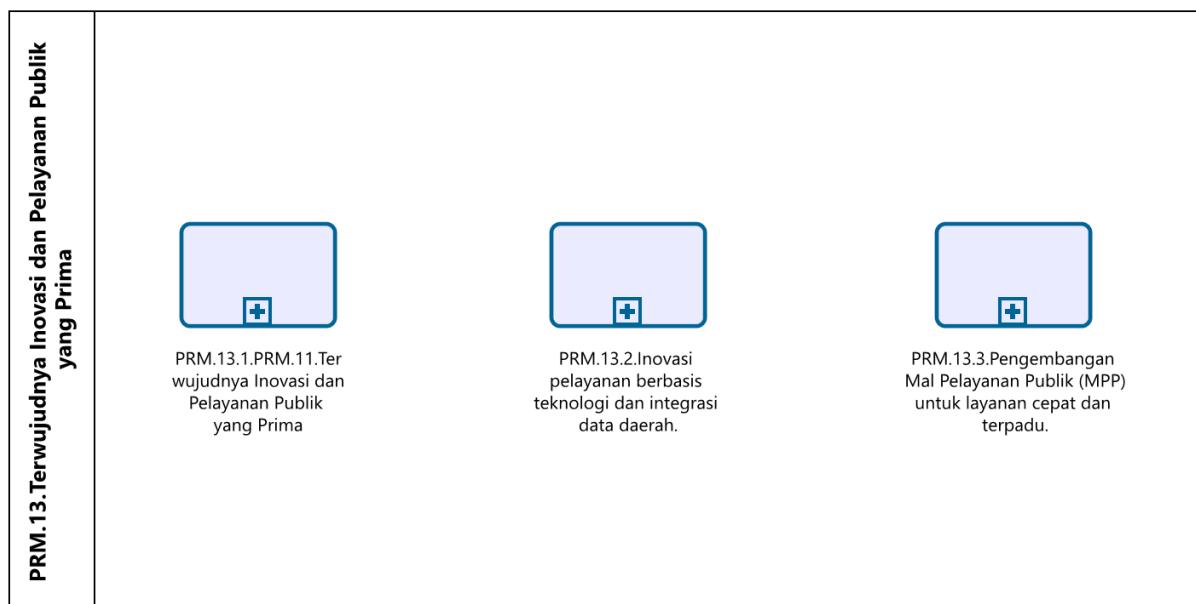
Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Pariaman. Proses ini diawali dengan kegiatan PRM.12.3.1, yaitu penyusunan kebijakan dan regulasi keterbukaan informasi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan bertujuan untuk menciptakan dasar hukum dan pedoman teknis yang menjamin hak publik atas informasi. Langkah ini menjadi fondasi penting dalam membentuk sistem pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif.

Selanjutnya, pada tahapan PRM.12.3.2 dan PRM.12.3.3, dilakukan penyediaan dan pengelolaan layanan informasi publik serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Layanan informasi publik dikembangkan agar mudah diakses oleh masyarakat melalui berbagai media, baik daring maupun luring. Edukasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hak atas informasi publik serta cara mengaksesnya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang aktif, kritis, dan terlibat dalam proses pemerintahan.

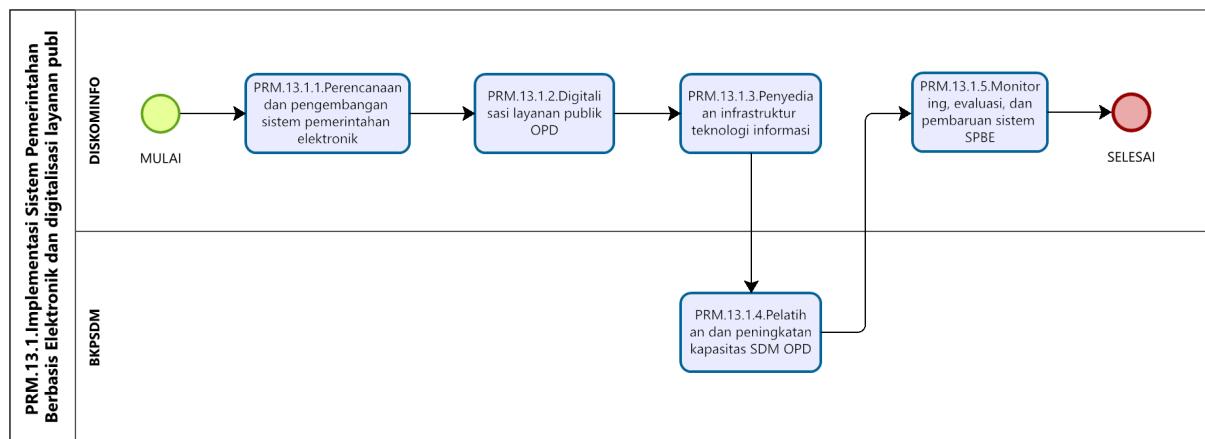
Langkah terakhir dalam siklus ini mencakup monitoring, evaluasi, dan peningkatan kualitas layanan informasi (PRM.12.3.4), serta integrasi sistem informasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan transparansi data (PRM.12.3.5). Melalui evaluasi berkala, Diskominfo dapat mengidentifikasi kekurangan dan peluang peningkatan layanan. Sementara itu, integrasi sistem informasi antar OPD memastikan bahwa data dan informasi yang disampaikan kepada publik konsisten, akurat, dan dapat diakses secara real-time. Keseluruhan proses ini selaras dengan arah kebijakan dalam RPJMD Kota Pariaman yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang terbuka, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

13. Subproses dan Lintas Fungsi, PRM.13 Terwujudnya Inovasi dan Pelayanan Publik yang Prima (Level 1)

Peta proses bisnis PRM.13: Terwujudnya Inovasi dan Pelayanan Publik yang Prima dalam RPJMD Kota Pariaman 2025–2029 menekankan transformasi layanan pemerintah menuju sistem yang lebih cepat, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui penguatan inovasi pelayanan publik, penerapan layanan berbasis teknologi dan integrasi data daerah. Proses ini sejalan dengan arah kebijakan RPJMD yang mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat, memperkuat kepercayaan publik, dan mendukung tercapainya visi pembangunan Kota Pariaman yang modern, inklusif, dan responsif.



a. PRM.13.1 Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Digitalisasi Layanan Publik (LEVEL 2)

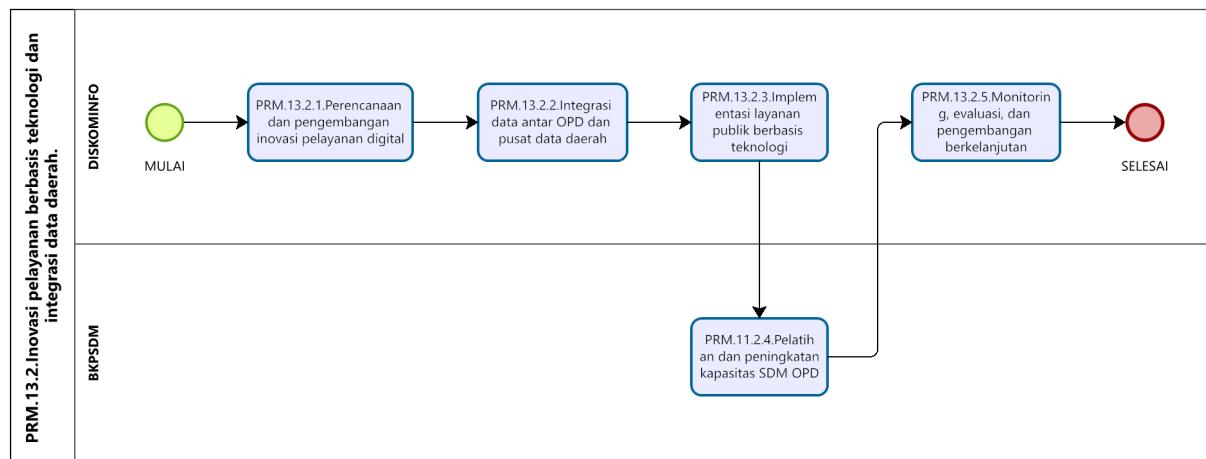


PRM 13.1 Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Digitalisasi Layanan Publik dimulai dengan perencanaan dan pengembangan sistem pemerintahan elektronik (PRM.13.1.1) yang dilakukan oleh Diskominfo. Tahapan ini penting sebagai fondasi awal dalam membangun sistem yang mendukung tata kelola pemerintahan modern. Selanjutnya, dilakukan digitalisasi layanan publik di OPD (PRM.13.1.2), yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan efisiensi layanan kepada masyarakat secara daring.

Proses ini berlanjut ke penyediaan infrastruktur teknologi informasi (PRM.13.1.3) yang menjadi tulang punggung operasionalisasi sistem elektronik. Dalam tahap ini, peran Diskominfo sangat krusial untuk memastikan ketersediaan perangkat keras dan lunak yang handal. Pada saat yang sama, dilakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM OPD (PRM.13.1.4) oleh BKPSDM untuk memastikan kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola dan memanfaatkan sistem yang ada.

Tahapan terakhir adalah monitoring, evaluasi, dan pembaruan sistem SPBE (PRM.13.1.5), yang dilakukan untuk menjamin keberlanjutan dan peningkatan kualitas implementasi sistem pemerintahan elektronik. Proses ini memastikan bahwa sistem yang dijalankan tetap relevan, efektif, dan sesuai dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang.

b. PRM.13.2.Inovasi pelayanan berbasis teknologi dan integrasi data daerah (LEVEL 2)

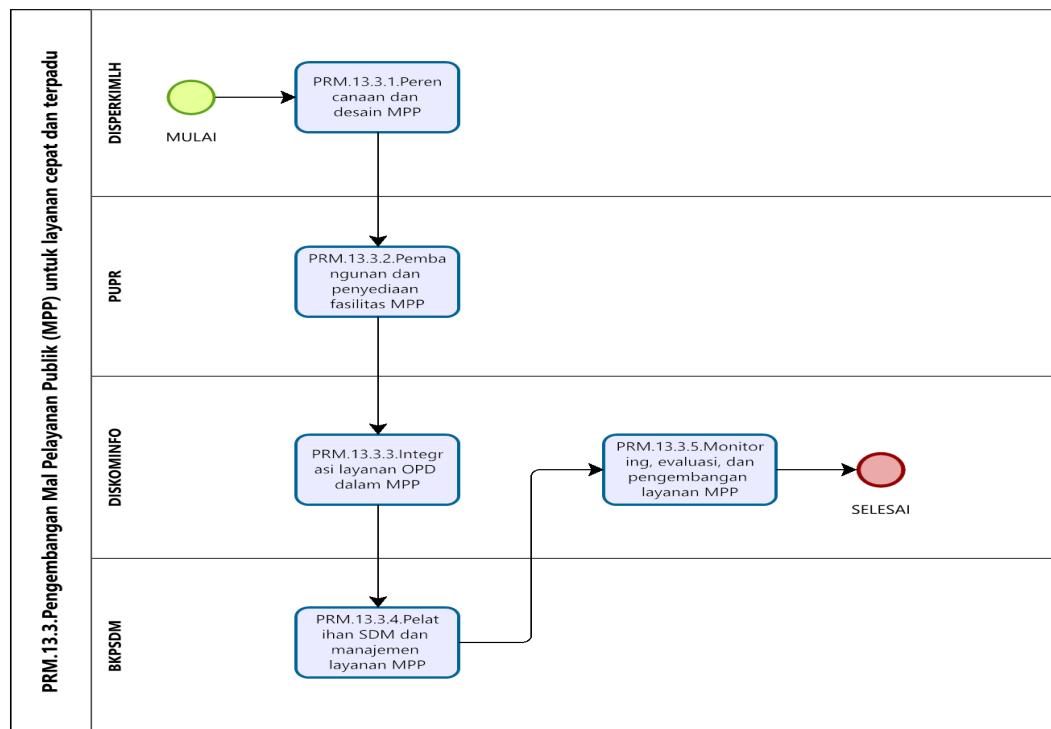


Program ini berfokus pada peningkatan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital serta penguatan integrasi data antar perangkat daerah dan pusat. Inisiatif ini diawali dengan perencanaan dan pengembangan inovasi pelayanan digital (PRM.13.2.1) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai langkah awal dalam membangun ekosistem pelayanan publik yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat Kota Pariaman.

Tahapan selanjutnya adalah integrasi data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pusat data daerah (PRM.13.2.2). Upaya ini bertujuan menciptakan satu kesatuan sistem informasi daerah yang saling terhubung untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Setelah itu, dilakukan implementasi layanan publik berbasis teknologi (PRM.13.2.3) yang melibatkan kolaborasi lintas sektor agar setiap inovasi digital dapat dioperasionalkan secara optimal.

Selain itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memiliki peran penting melalui kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM OPD (PRM.11.2.4), guna memastikan aparatur mampu mengelola dan mengembangkan sistem berbasis teknologi secara berkelanjutan. Tahap akhir adalah monitoring, evaluasi, dan pengembangan berkelanjutan (PRM.13.2.5) untuk menjamin bahwa inovasi yang diterapkan tetap relevan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

c. PRM.13.3 Pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk Layanan Cepat dan Terpadu (LEVEL 2)



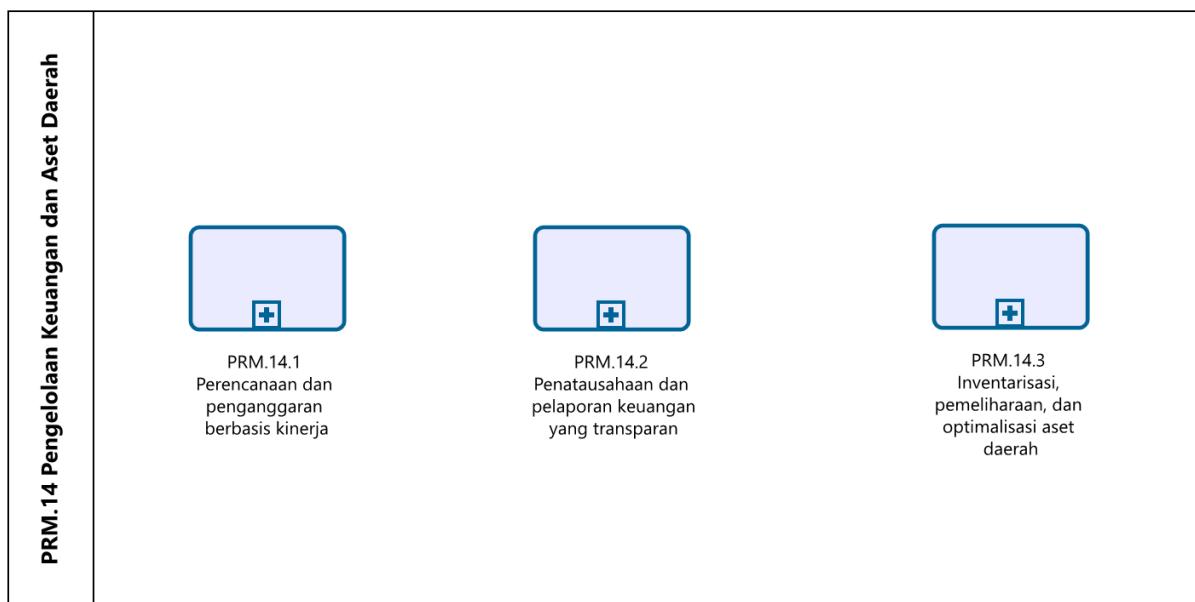
Upaya ini diawali oleh Dinas Perizinan, Koperasi, dan UMKM (DISPERKIMLH) dengan kegiatan perencanaan dan desain MPP (PRM.13.3.1), yang menekankan pada penyusunan konsep tata ruang, alur layanan, serta integrasi antar instansi yang akan tergabung di dalam MPP.

Selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melaksanakan pembangunan dan penyediaan fasilitas MPP (PRM.13.3.2), yang mencakup pembangunan infrastruktur gedung serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung agar pelayanan dapat berlangsung nyaman, efisien, dan ramah masyarakat. Setelah fasilitas siap, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) melanjutkan dengan integrasi layanan OPD dalam MPP (PRM.13.3.3) untuk memastikan seluruh layanan publik dapat diakses dalam satu sistem yang terhubung secara digital.

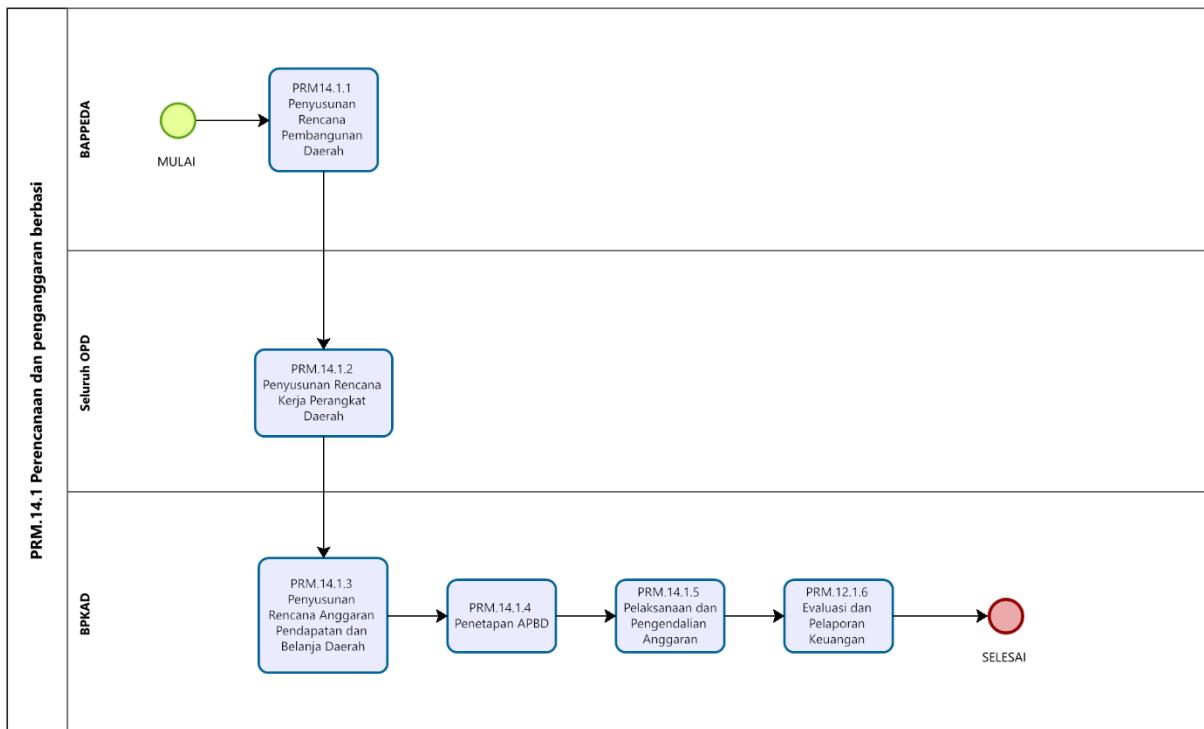
Tahapan berikutnya adalah pelatihan SDM dan manajemen layanan MPP (PRM.13.3.4) oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) guna meningkatkan kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan prima di lingkungan MPP. Rangkaian kegiatan ini ditutup dengan monitoring, evaluasi, dan pengembangan layanan MPP (PRM.13.3.5) untuk menjamin keberlanjutan, kualitas, serta adaptasi layanan terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

14. Subproses dan Lintas Fungsi, PRM.14 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Level 1)

Peta proses bisnis PRM.14: Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam RPJMD Kota Pariaman 2025–2029 menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Fokusnya meliputi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, penatausahaan serta pelaporan keuangan yang transparan, serta inventarisasi, pemeliharaan, dan optimalisasi aset daerah. Proses ini sejalan dengan arah kebijakan RPJMD yang menempatkan pengelolaan keuangan dan aset sebagai fondasi penting untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, meningkatkan efektivitas belanja publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.



a. PRM.14.1 Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja (LEVEL 2)

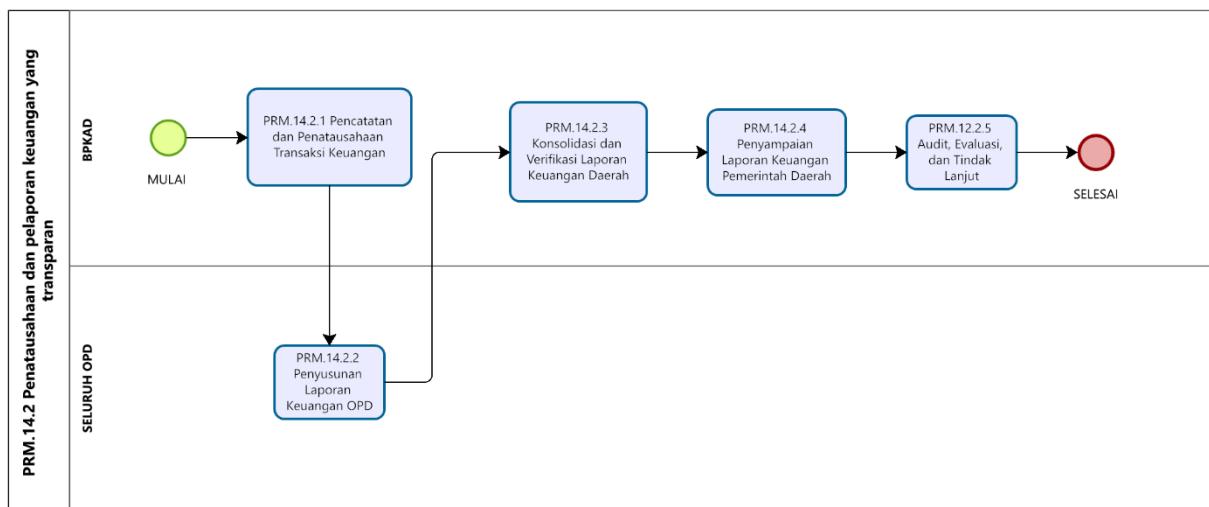


Program ini mencakup keseluruhan proses perencanaan dan penganggaran daerah secara terintegrasi, mulai dari penyusunan rencana pembangunan, rencana kerja perangkat daerah, hingga penganggaran dan evaluasi kinerja keuangan. Melalui sinergi antara Bappeda, seluruh OPD, dan BPKAD Kota Pariaman, kegiatan ini memastikan bahwa setiap tahapan perencanaan dan penganggaran berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berbasis hasil (output-outcome).

Pelaksanaan program dilakukan melalui beberapa sub-proses utama, yaitu penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (PRM.14.1.1), penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PRM.14.1.2), penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PRM.14.1.3), penetapan APBD (PRM.14.1.4), pelaksanaan serta pengendalian anggaran (PRM.14.1.5), hingga evaluasi dan pelaporan keuangan (PRM.14.1.6). Setiap tahap saling berkelanjutan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Program PRM.14.1 ini memiliki keterkaitan langsung dengan Bab VI RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025–2029 yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. Bab tersebut menegaskan pentingnya penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta mendukung pencapaian visi Kota Pariaman yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

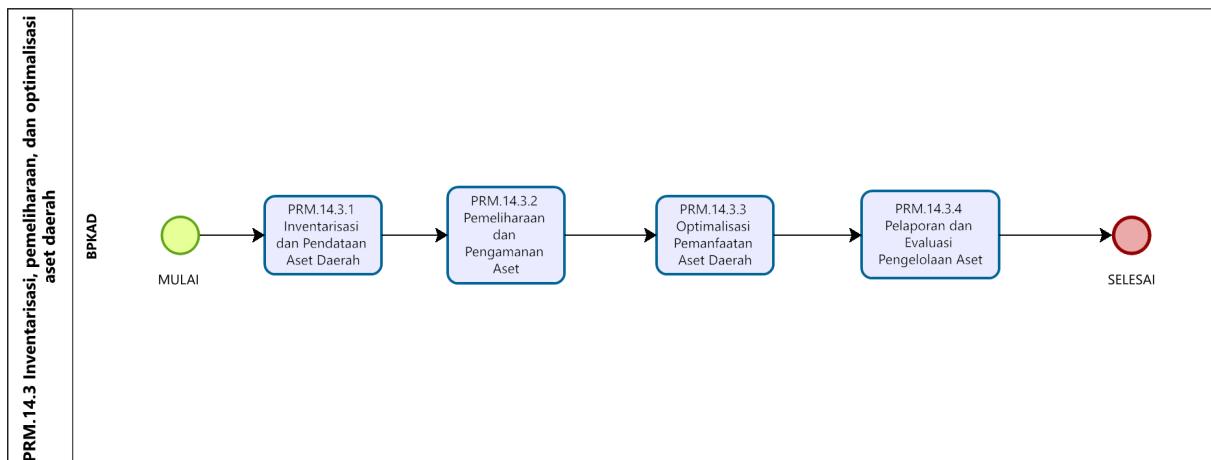
b. PRM.14.2 Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan yang Transparan (LEVEL 2)



Pelaksanaan program dilakukan melalui beberapa kegiatan berurutan, yakni pencatatan dan penatausahaan transaksi keuangan (PRM.14.2.1), penyusunan laporan keuangan oleh masing-masing OPD (PRM.14.2.2), konsolidasi serta verifikasi laporan keuangan daerah (PRM.14.2.3), hingga penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah (PRM.14.2.4). Tahap akhir berupa audit, evaluasi, dan tindak lanjut (PRM.12.2.5) menjadi mekanisme kontrol penting untuk menilai efektivitas serta kepatuhan dalam pengelolaan anggaran.

Program ini berhubungan langsung dengan Bab VI RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025–2029, yang menegaskan pentingnya peningkatan tata kelola keuangan daerah berbasis transparansi dan akuntabilitas publik. Melalui penerapan sistem pelaporan yang terbuka dan terukur, diharapkan terwujud pemerintahan yang bersih serta mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

c. PRM.14.3 Inventarisasi, Pemeliharaan, dan Optimalisasi Aset Daerah (LEVEL 2)



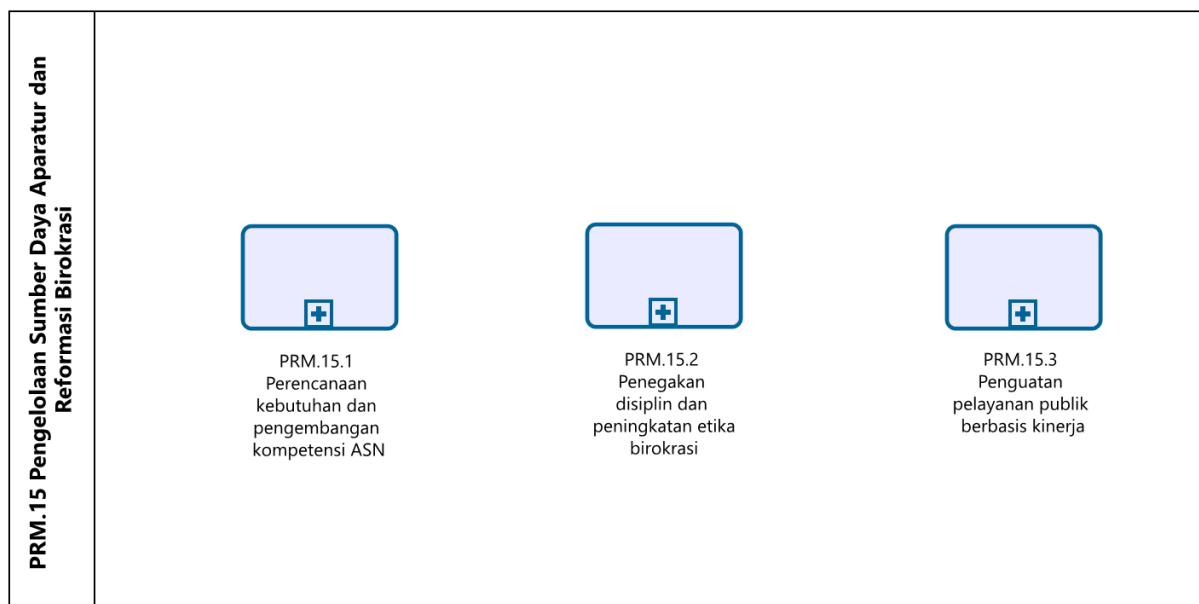
Program ini berfokus pada peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah agar pemanfaatannya dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan Kota Pariaman. Melalui inventarisasi dan pendataan aset secara menyeluruh (PRM.14.3.1), pemerintah daerah memastikan bahwa seluruh aset tercatat dengan baik dan memiliki status hukum yang jelas. Tahap berikutnya yaitu pemeliharaan dan pengamanan aset (PRM.14.3.2), dilakukan untuk menjaga keberlangsungan nilai serta fungsi aset agar tetap optimal digunakan dalam mendukung pelayanan publik.

Selanjutnya, kegiatan optimalisasi pemanfaatan aset daerah (PRM.14.3.3) diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas aset melalui pengelolaan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan pembangunan daerah. Proses pelaporan dan evaluasi pengelolaan aset (PRM.14.3.4) menjadi tahapan penting dalam memastikan setiap langkah pengelolaan dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

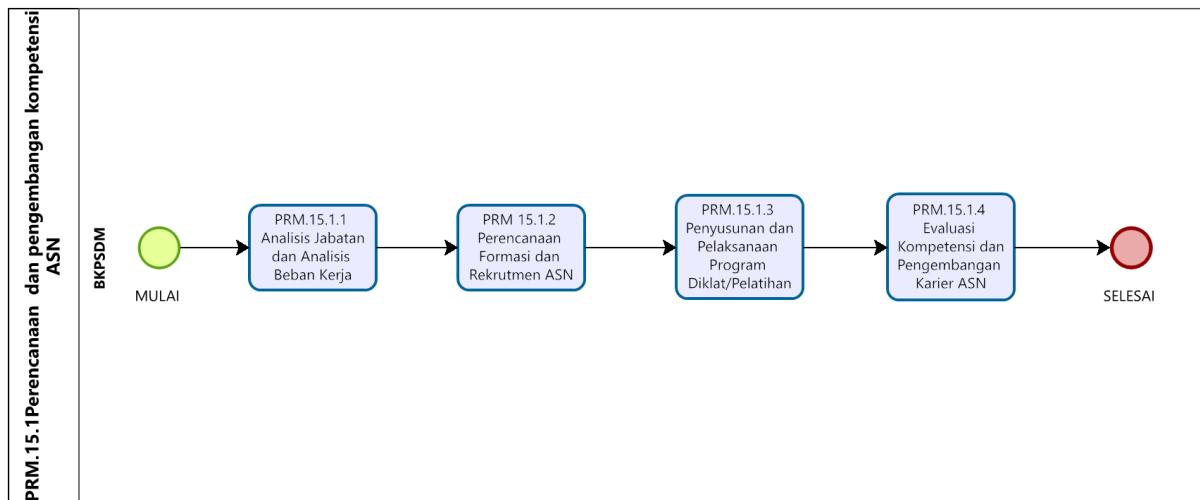
Program ini memiliki keterkaitan erat dengan Bab VI RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025–2029, khususnya pada arah kebijakan peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Melalui sistem pengelolaan aset yang terstruktur, transparan, dan berkelanjutan, Pemerintah Kota Pariaman diharapkan mampu memaksimalkan potensi aset daerah sebagai salah satu sumber daya strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

15. Subproses dan Lintas Fungsi, PRM.15 Pengelolaan Sumber Daya Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Level 1)

Peta proses bisnis PRM.15: Pengelolaan Sumber Daya Aparatur dan Reformasi Birokrasi dalam RPJMD Kota Pariaman 2025–2029 menekankan pentingnya peningkatan kapasitas, integritas, dan kinerja aparatur sebagai motor utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Proses ini mencakup perencanaan kebutuhan dan pengembangan kompetensi ASN, penegakan disiplin serta peningkatan etika birokrasi, hingga penguatan pelayanan publik berbasis kinerja. Dengan demikian, RPJMD menempatkan reformasi birokrasi dan pengelolaan SDM aparatur sebagai strategi kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, melayani, serta mampu mendukung pencapaian pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan.



a. PRM.15.1 Perencanaan dan Pengembangan Kompetensi ASN (LEVEL 2)

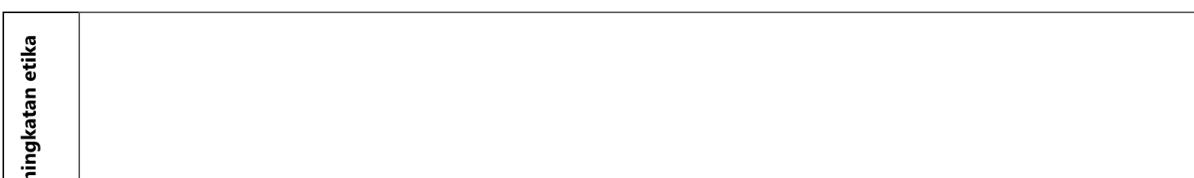


Program ini menitikberatkan pada peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui perencanaan serta pengembangan kompetensi yang sistematis dan terukur. Tahapan awal dimulai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja (PRM.15.1.1) yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara struktur organisasi dengan kebutuhan pelayanan publik. Hasil analisis tersebut menjadi dasar bagi perencanaan formasi dan rekrutmen ASN (PRM.15.1.2), sehingga proses pengisian jabatan dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Selanjutnya, melalui penyusunan dan pelaksanaan program diklat/pelatihan (PRM.15.1.3), pemerintah daerah berupaya meningkatkan keterampilan, wawasan, serta integritas ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kegiatan ini dilengkapi dengan evaluasi kompetensi dan pengembangan karier ASN (PRM.15.1.4) untuk memastikan setiap pegawai memiliki jalur karier yang jelas, berbasis kinerja, serta berorientasi pada pelayanan publik yang unggul.

Program ini memiliki keterkaitan langsung dengan Bab VI RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025–2029, khususnya pada arah kebijakan penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur, Pemerintah Kota Pariaman diharapkan mampu mewujudkan birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berintegritas tinggi dalam mendukung visi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

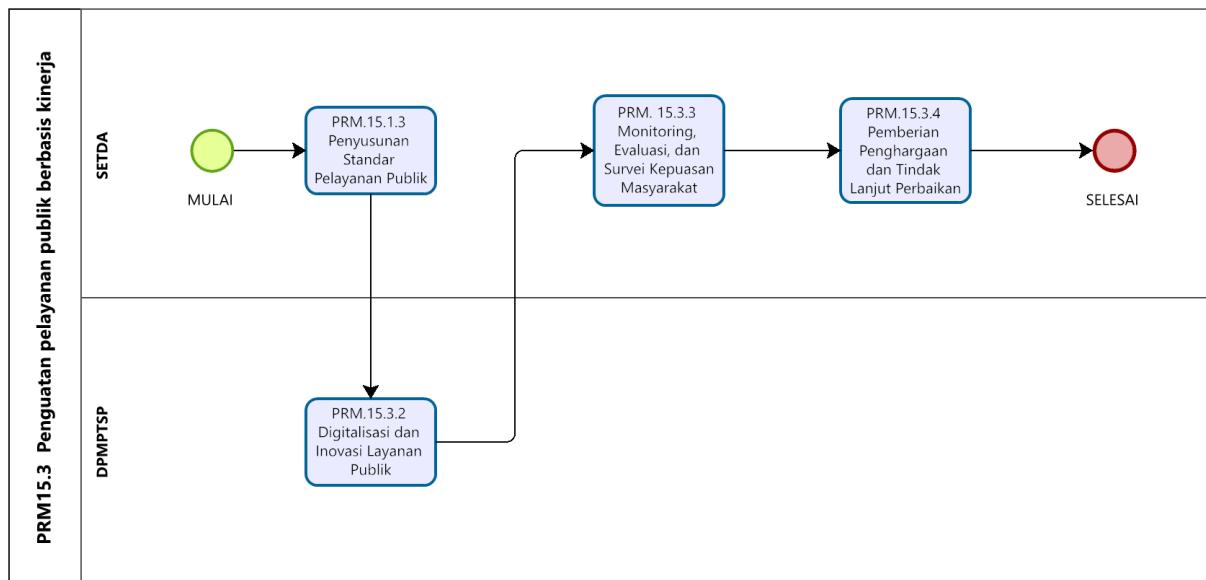
b. PRM.15.2 Penegakan Disiplin dan Peningkatan Etika Birokrasi (LEVEL 2)



Upaya penegakan disiplin dan peningkatan etika birokrasi menjadi langkah strategis dalam memperkuat integritas serta profesionalisme aparatur di Kota Pariaman. Program ini merupakan bagian dari implementasi Bab VI RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025--2029, yang mendukung Misi ke-5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Fokus utama program adalah menciptakan budaya kerja yang disiplin, beretika tinggi, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pelaksanaan PRM.15.2 dimulai dengan PRM.15.2.1 Penyusunan dan Sosialisasi Aturan Disiplin ASN oleh BKPSDM bekerja sama dengan SETDA, yang meliputi penyusunan peraturan disiplin yang komprehensif dan sosialisasi kepada seluruh ASN melalui berbagai media untuk memastikan pemahaman yang merata. Tahapan berikutnya adalah PRM.15.2.2 Pembinaan dan Pengawasan Disiplin ASN yang dilaksanakan secara berkelanjutan melalui pemantauan kehadiran, ketepatan waktu, kepatuhan terhadap SOP, dan perilaku kerja profesional, dengan BKPSDM membuat sistem pemantauan terintegrasi yang mencakup presensi digital dan laporan kinerja berkala. Selanjutnya dilakukan PRM.15.2.3 Penegakan Sanksi dan Tindakan Disiplin terhadap ASN yang melakukan pelanggaran secara objektif dan adil sesuai tingkat pelanggaran, yang mencakup investigasi, pemberian kesempatan penjelasan, dan penetapan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Program diakhiri dengan PRM.15.2.4 Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Berkelanjutan melalui pengukuran indikator disiplin seperti tingkat kehadiran dan tingkat pelanggaran disiplin, dengan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi area perbaikan dan menyusun strategi perbaikan berkelanjutan guna memperkuat budaya disiplin dan etika birokrasi di seluruh organisasi perangkat daerah Kota Pariaman.

c. PRM.15.3 Penguatan Pelayanan Publik Berbasis Kinerja (LEVEL 2)



Penguatan pelayanan publik berbasis kinerja merupakan komitmen strategis Pemerintah Kota Pariaman dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Program ini merupakan bagian dari implementasi Bab VI RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025–2029, yang mendukung Misi ke-5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Fokus utama program adalah meningkatkan standar dan kualitas pelayanan publik melalui penetapan standar layanan yang jelas, digitalisasi dan inovasi layanan, serta pengukuran kepuasan masyarakat secara berkelanjutan.

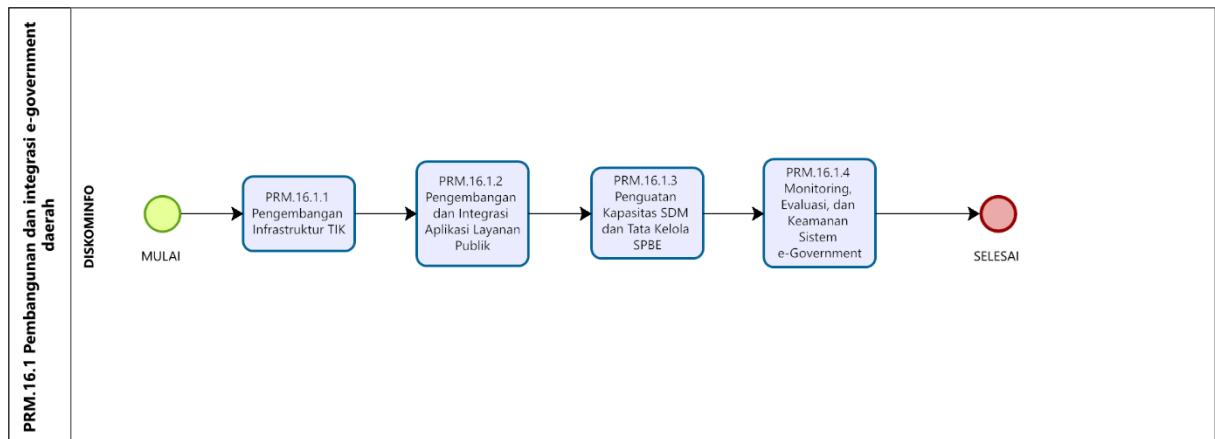
Pelaksanaan PRM.15.3 dimulai dengan PRM.15.3.1 Penyusunan Standar Pelayanan Publik oleh SETDA bekerja sama dengan seluruh OPD, yang meliputi penetapan standar dan norma pelayanan, prosedur, waktu tunggu, dan komitmen kualitas layanan yang transparan dan terukur untuk setiap jenis layanan publik yang diberikan. Tahapan berikutnya adalah PRM.15.3.2 Digitalisasi dan Inovasi Layanan Publik oleh DISKOMINFO, yang mencakup pengembangan sistem informasi terintegrasi, platform layanan daring, dan inovasi tata cara pelayanan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kepuasan pengguna. Selanjutnya dilakukan PRM.15.3.3 Monitoring, Evaluasi, dan Survei Kepuasan Masyarakat melalui pengukuran indikator kinerja layanan, pengumpulan feedback dari pengguna layanan, dan analisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas dan kecepatan pelayanan yang diberikan oleh masing-masing OPD. Program diakhiri dengan PRM.15.3.4 Pemberian Penghargaan dan Tindak Lanjut Perbaikan yang melibatkan BKPSDM dalam memberikan insentif kepada OPD dan aparatur yang mencapai standar pelayanan terbaik.

16. Subproses dan Lintas Fungsi, PRM.16 Penguatan Sistem Informasi dan Digitalisasi Layanan (Level 1)

Peta proses bisnis PRM.16 “Penguatan Sistem Informasi dan Digitalisasi Layanan” sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Kota Pariaman 2025–2029 yang menekankan transformasi tata kelola pemerintahan menuju pemerintahan digital yang transparan, efektif, dan berorientasi pelayanan publik. Melalui pembangunan dan integrasi e-government daerah, pengelolaan data dan informasi pembangunan berbasis digital, serta pengembangan inovasi layanan publik melalui transformasi digital, Pemerintah Kota Pariaman berupaya menciptakan birokrasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Keseluruhan proses ini mendukung tercapainya visi RPJMD untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam era digital.

<p>PRM.16 Penguatan Sistem Informasi dan Digitalisasi Layanan</p>	 <p>PRM.16.1 Pembangunan dan integrasi e-government daerah</p>	 <p>PRM.16.2 Pengelolaan data dan informasi pembangunan berbasis digital</p>	 <p>PRM.16.3 Inovasi layanan publik melalui transformasi digital</p>
--	---	--	---

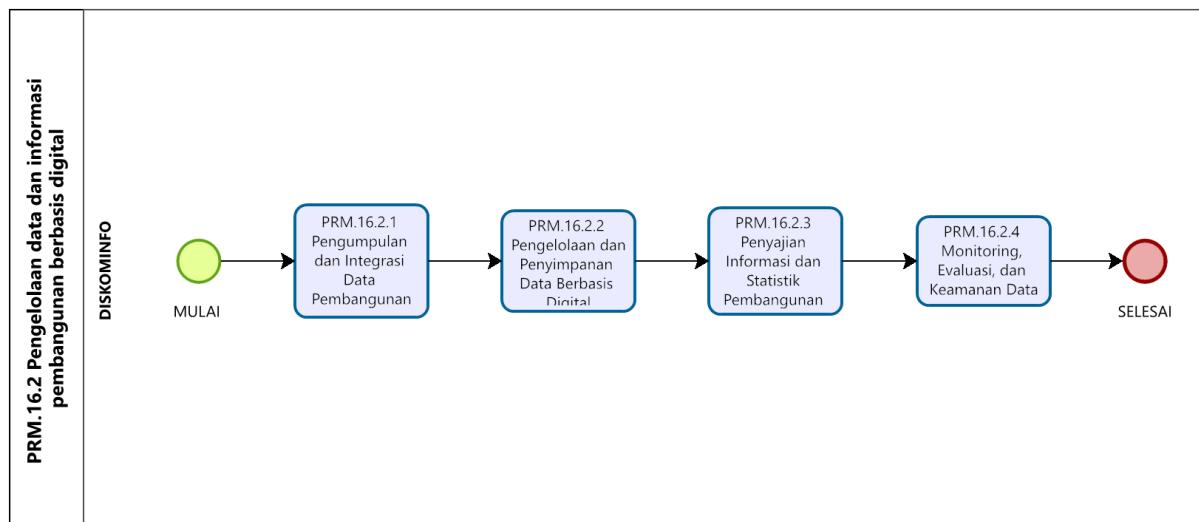
a. PRM.16.1 Pengembangan Infrastruktur TIK dan Integrasi Sistem (LEVEL 2)



Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang modern dan terintegrasi di Kota Pariaman. Program ini merupakan bagian dari implementasi Bab VI RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025--2029, yang mendukung transformasi digital pemerintahan daerah. Fokus utama program adalah membangun infrastruktur TIK yang handal, mengintegrasikan berbagai sistem layanan publik, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan memastikan keamanan sistem e-government melalui monitoring berkelanjutan.

Pelaksanaan PRM.16.1 dimulai dengan PRM.16.1.1 Pengembangan Infrastruktur TIK oleh DISKOMINFO, yang meliputi perencanaan, pembangunan, dan peningkatan kualitas infrastruktur jaringan, data center, server, dan perangkat pendukung lainnya untuk mendukung operasionalisasi sistem pemerintahan digital. Tahapan berikutnya adalah PRM.16.1.2 Pengembangan dan Integrasi Aplikasi Layanan Publik yang mencakup pengembangan sistem informasi terintegrasi, platform layanan daring, dan integrasi berbagai aplikasi antar OPD untuk memastikan data dan informasi dapat diakses secara real-time dan konsisten. Selanjutnya dilakukan PRM.16.1.3 Peningkatan Kapasitas SDM dan Tata Kelola SPBE oleh DISKOMINFO bekerja sama dengan BKPSDM, melalui pelatihan teknis, pemahaman sistem e-government, dan pengembangan kompetensi pengelola TIK agar aparatur mampu mengoperasionalisasi dan memelihara sistem dengan optimal. Program diakhiri dengan PRM.16.1.4 Monitoring, Evaluasi, dan Keamanan Sistem e-Government, yang meliputi pemantauan kinerja infrastruktur TIK, evaluasi tingkat ketersediaan sistem, penerapan standar keamanan informasi, dan penyempurnaan berkelanjutan untuk memastikan sistem tetap aman, stabil, dan mampu mendukung pelayanan publik berbasis digital di Kota Pariaman.

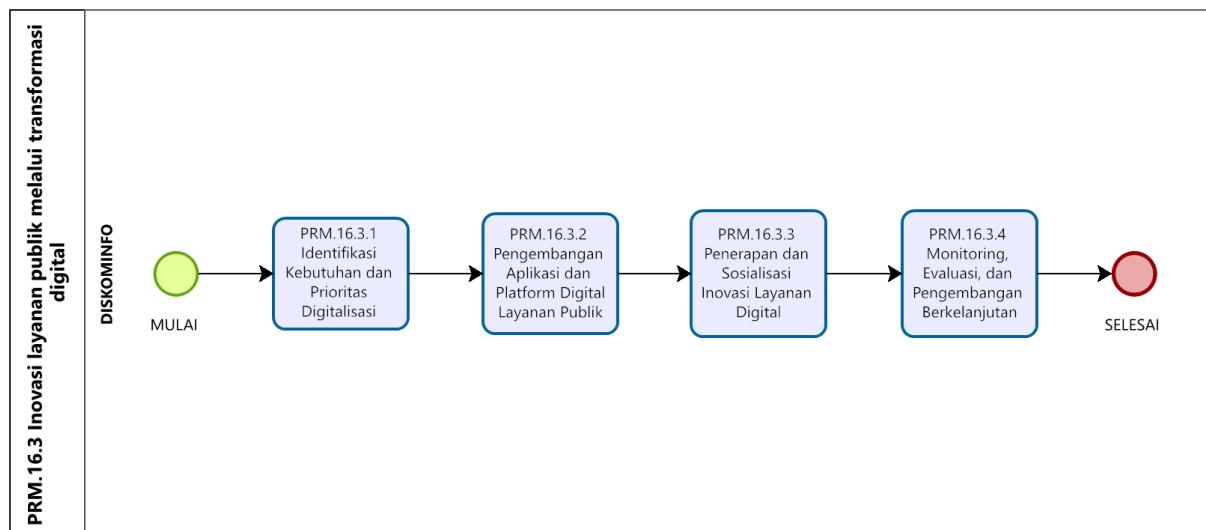
b. PRM.16.2 Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Berbasis Digital (LEVEL 2)



Pengelolaan data dan informasi pembangunan berbasis digital merupakan komponen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis data dan transparansi di Kota Pariaman. Program ini merupakan bagian dari implementasi Bab VI RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025–2029, yang mendukung transformasi digital dan peningkatan kualitas pengambilan keputusan berbasis data. Fokus utama program adalah mengintegrasikan dan mengelola data pembangunan secara terpusat, menyimpan data dalam format digital yang terstandar, menyajikan informasi statistik pembangunan secara periodik, dan memantau kualitas serta keamanan data secara berkelanjutan.

Pelaksanaan PRM.16.2 dimulai dengan PRM.16.2.1 Pengumpulan dan Integrasi Data Pembangunan oleh DISKOMINFO bekerja sama dengan BAPPEDA dan seluruh OPD, yang meliputi pengumpulan data dari berbagai sumber, validasi data, dan integrasi ke dalam sistem database terpusat untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi pembangunan daerah. Tahapan berikutnya adalah PRM.16.2.2 Pengelolaan dan Penyimpanan Data Berbasis Digital, yang mencakup pengorganisasian data dalam sistem manajemen basis data, penerapan standar format digital, dan pemeliharaan infrastruktur penyimpanan data untuk menjamin ketersediaan dan aksesibilitas data. Selanjutnya dilakukan PRM.16.2.3 Penyajian Informasi dan Statistik Pembangunan melalui pengembangan dashboard interaktif, laporan analitik berkala, dan publikasi data pembangunan kepada publik melalui berbagai platform untuk mendukung transparansi dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Program diakhiri dengan PRM.16.2.4 Monitoring, Evaluasi, dan Keamanan Data, yang meliputi pemantauan akurasi dan kelengkapan data, evaluasi kualitas informasi yang dihasilkan.

c. PRM.16.3 Inovasi Layanan Publik Melalui Transformasi Digital (LEVEL 2)



Inovasi layanan publik melalui transformasi digital merupakan strategi penting dalam meningkatkan kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan pemerintah kepada masyarakat Kota Pariaman. Program ini merupakan bagian dari implementasi Bab VI RPJMD Kota Pariaman Tahun 2025–2029, yang mendukung transformasi pemerintahan menuju era digital yang inklusif dan responsif. Fokus utama program adalah mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas digitalisasi, mengembangkan aplikasi dan platform layanan digital yang inovatif, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta memantau efektivitas inovasi secara berkelanjutan.

Pelaksanaan PRM.16.3 dimulai dengan PRM.16.3.1 Identifikasi Kebutuhan dan Prioritas Digitalisasi oleh DISKOMINFO bekerja sama dengan BAPPEDA dan seluruh OPD, yang meliputi analisis kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik digital, identifikasi layanan prioritas untuk digitalisasi, dan penyusunan roadmap transformasi digital yang sesuai dengan kapasitas organisasi. Tahapan berikutnya adalah PRM.16.3.2 Pengembangan Aplikasi dan Platform Digital Layanan Publik, yang mencakup desain user interface yang user-friendly, pengembangan aplikasi mobile dan web, serta integrasi dengan sistem backend untuk memastikan layanan digital dapat diakses dengan mudah dan responsif. Selanjutnya dilakukan PRM.16.3.3 Penerangan dan Sosialisasi Inovasi Layanan Digital kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi, pelatihan penggunaan aplikasi, dan pembentukan komunitas pengguna untuk meningkatkan pemahaman dan adopsi layanan digital di kalangan publik. Program diakhiri dengan PRM.16.3.4 Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Berkelanjutan, yang meliputi pemantauan tingkat penggunaan aplikasi, pengumpulan feedback pengguna, evaluasi kepuasan masyarakat terhadap inovasi layanan.

B. Peta Relasi Antar Proses

Proses Utama	Proses Manajerial	Proses Pendukung
PRM. 1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Literasi Digital	PRM.12 Meningkatnya Profesionalisme, Transparansi, dan Akuntabilitas Pemerintahan	PRM.14 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
DIKPORA BKPSDM DISKOMINFO	BKPSDM BPKPD DISKOMINFO	BAPPEDA BPKPD
PRM . 2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk	PRM.13 Terwujudnya Inovasi dan Pelayanan Publik yang Prima	PRM.15 Pengelolaan Sumber Daya Aparatur dan Reformasi Birokrasi

DINKES BAPPEDA PUPR DISPERINDAGKOP	DISKOMINFO BKPSDM DISPERKIMLH	BKPSDM SETDA DPMPTSP
PRM.3 Meningkatnya Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi		PRM.16 Penguatan Sistem Informasi dan Digitalisasi Layanan
DPMPTSP dan NAKER DISPERINDAGKOP DINSOS		DISKOMINFO
PRM.4 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sektor unggulan dan investasi		
DPPP DISPARBUD DISPERINDAGKOP BAPPEDA DPMPTSP PUPR		
PRM.5 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian, perikanan, UMKM, dan ekonomi kreatif		
DPPP DISPERINDAGKOP DPMPTSP dan NAKER		
PRM.6 Meningkatnya kesempatan kerja dan kualitas tenaga kerja		
DPMPTSP dan NAKER DIKPORA DISPERINDAGKOP		
PRM.7 Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah		
PUPR DISHUB DISKOMINFO		

DIKPORA DISPERINDAGKOP DPMPTSP dan NAKER		
PRM.8 Tersedianya infrastruktur lingkungan berkelanjutan ramah dan		
DISHUB PUPR DISPERKIMLH		
PRM.9 Meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana		
BPBD PUPR		
PRM.10 Pelestarian dan Penguatan Budaya Lokal berbasis ABS-SBK		
DIKPORA		
PRM.11 Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya, Religi, dan Ekonomi Kreatif		
DIKPORA PUPR		